

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2018



Dinas Esdm Ntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Mataram Telepon (0370) 621356 Faximile (0370) 625766

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 berisi pencapaian kinerja organisasi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018. Dengan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berarti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kelima implementasi Rencana Strategis Dinas 2013-2018 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2013-2018, untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam operasional program dan kegiatan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi dinas.

LkjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang energi dan sumber daya mineral. LkjIP juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Laporan ini belum secara sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Provinsi NTB. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LkjIP ini.

Mataram, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. Muhammad Husni, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Operasional.....	3
C. Kedudukan, Tupoksi dan Susunan Organisasi	5
D. Sistematika Penyusunan Laporan	9
 BAB II Perencanaan Kinerja	 10
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun	20
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	 26
A. Capaian Kinerja	26
B. Analisis Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja	30
C. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja	42
D. Realisasi Anggaran	45
 BAB IV Penutup	 50
 Lampiran-lampiran	
1. Rencana Strategis SKPD	
2. Indikator Kinerja Utama SKPD	
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2018	
6. Laporan Pendukung LKjIP Tahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2018	vi
Tabel 1.1	PDRB Provinsi NTB Tahun 2018 Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (dalam Juta Rupiah).....	2
Tabel 1.2	Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2018	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018...	21
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018	21
Tabel 2.3	Program, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ...	22
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Program Tahun 2018	23
Tabel 2.5	Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018	24
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018, berdasarkan target dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018	26
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018 berdasarkan target dalam Renja SKPD Tahun 2018	28
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tahun 2018 berdasarkan target Rencana Kinerja SKPD Tahun 2018	29
Tabel 3.5	Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2018	31
Tabel 3.6	Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2017	31
Tabel 3.7	Data Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018	32
Tabel 3.8	Perbandingan Neraca Daya Sistem Nusa Tenggara Barat 2017-2018	36
Tabel 3.9	Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi NTB Tahun 2013-2018.....	37
Tabel 3.10	Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sampai 31 Desember 2018	41
Tabel 3.11	Rekapitulasi Piutang Negara Dari Iuran Tetap dan Pemegang IUP Sampai Dengan Desember 2018	41

Tabel 3.12	Perbandingan Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2017-2018	42
Tabel 3.13	Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk mencapai Kinerja Dinas ESDM	44
Tabel 3.14	Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung melalui APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan SKPD	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016.....	8
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018	37
Gambar 3.2	Grafik Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2013-2018	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholder* pelaku pembangunan. OPD diberikan tugas untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi di Provinsi NTB sesuai kewenangannya, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.

LKjIP Tahun 2018 menyajikan informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2013-2018. LKjIP ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral. Keberhasilan ini tentunya bukan hanya menjadi keberhasilan OPD semata, tetapi juga menjadi keberhasilan seluruh komponen organisasi pengelola urusan energi dan sumber daya mineral dan dukungan berbagai pihak serta partisipasi masyarakat secara umum dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2018 Dinas ESDM Provinsi NTB melalui pelaksanaan program dan kegiatan telah berupaya meningkatkan ketersediaan energi, kelitrikan dan air bersih yang bersumber dari air tanah, meningkatkan pendayagunaan potensi dan pengusahaan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator Kinerja Utama dan Pendukung Dinas ESDM Provinsi NTB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 912-409 Tahun 2014 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	%	75,00	93,83	125,11
2.	Cakupan Air Bersih (pendukung *)	KK	255	255	100,00
Rata-rata capaian kinerja					112,56

*) Dinas ESDM berkontribusi sebesar 255 KK untuk capaian cakupan air bersih perdesaan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Provinsi NTB.

Disamping 2 indikator kinerja utama dan pendukung di atas, beberapa indikator kinerja yang tertuang dalam target Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2018 diperoleh nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 91,60%;
2. Pencapaian Kinerja Program sebesar 90,33%;
3. Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 90,13%.
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Pendukung sebesar 112,56%.

Berdasarkan pencapaian keempat kinerja diatas didapatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,16 %.

Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan pengelolaan bidang pertambangan mineral dan batubara serta pengembangan energi baru terbarukan yang belum optimal.

Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Visi ‘Mewujudkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat’. Karenanya Dinas ESDM telah melakukan ikhtiar untuk dapat mewujudkan visinya melalui program dan kegiatan dalam rangka menjawab isu strategis sektor ESDM sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di selenggarakan untuk menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan lebih intensif diantaranya adalah angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Dari isu tersebut, sektor ESDM mencoba merumuskannya kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB dari sisi pemenuhan kebutuhan energi, listrik dan air bersih.

Isu strategis urusan pemerintahan bidang ESDM sangat terkait erat dengan aspek kebutuhan infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan hidup. Fokus kebijakan ESDM selama periode 2013-2018 diikhtiarkan untuk menjawab isu strategis sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya daya dukung dan kapasitas energi listrik dan air bersih.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya geologi.
3. NTB berada pada rangkaian sabuk gunung api yang memiliki potensi bencana alam geologi.
4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Guna menjawab isu strategis tersebut Dinas ESDM telah mengikhtiarkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi, Dinas ESDM pada tahun anggaran 2018 telah menjalankan kebijaksanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sebagai program utama dengan sasaran “terpenuhinya kebutuhan energi, listrik dan air bersih yang memadai”. Sasaran tersebut diterjemahkan melalui peningkatan Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) yang merupakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 912-409 Tahun 2014 tentang Penetapan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan dan memperkuat Ketahanan Energi Daerah melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. Rasio Elektrifikasi merupakan jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada. Sedangkan peningkatan Cakupan Air Bersih merupakan indikator kinerja pendukung dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah, dimana Dinas ESDM berkontribusi mendukung sasaran kebijakan tersebut bersama SKPD terkait lainnya. Cakupan Air Bersih merupakan rasio jumlah penduduk NTB yang mendapat akses air bersih dibandingkan dengan jumlah total penduduk NTB. Besar kontribusi diindikasikan dengan jumlah kepala keluarga (KK) atau jiwa yang mendapat layanan air bersih terutama pada area pembangunan infrastruktur sumur bor di daerah sulit air utamanya pada daerah perdesaan.

Dari sisi kewenangan sub bidang mineral dan batubara, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral diarahkan untuk mampu menghasilkan nilai tambah mineral yang setinggi-tingginya, dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan penerimaan negara dan devisa, peningkatan dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah nusantara, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dari PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTB Tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (dalam Juta rupiah)

LAPANGAN USAHA		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		Trw 4	
		ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.105.685,45	23,82	7.783.464,91	24,58	7.889.353,27	25,31		
B	Pertambangan dan Penggalian	4.329.942,74	14,51	4.017.245,72	12,69	3.640.525,21	11,68		
C	Industri Pengolahan	998.522,51	3,35	1.052.283,62	3,32	1.729.027,12	5,55		
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23.244,08	0,08	24.899,32	0,08	22.900,59	0,07		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.534,46	0,09	25.942,49	0,08	24.034,07	0,08		
F	Konstruksi	2.717.066,68	9,11	3.145.510,40	9,93	2.657.814,34	8,53		
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.235.736,20	14,20	4.723.815,22	14,92	4.654.456,01	14,93		
H	Transportasi dan Pergudangan	2.245.909,22	7,53	2.480.090,73	7,83	2.342.589,06	7,52		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	691.462,05	2,32	742.075,24	2,34	661.338,02	2,12		

LAPANGAN USAHA		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		Trw 4	
		ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%	ADHB	%
J	Informasi dan Komunikasi	593.043,73	1,99	605.285,27	1,91	622.693,65	2,00		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.185.363,65	3,97	1.198.494,62	3,79	1.169.518,23	3,75		
L	Real Estate	1.015.557,97	3,40	1.057.129,33	3,34	1.043.005,07	3,35		
M, N	Jasa Perusahaan	55.418,19	0,19	57.155,80	0,18	55.823,81	0,18		
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.880.766,12	6,30	2.018.774,60	6,38	1.847.511,38	5,93		
P	Jasa Pendidikan	1.518.662,43	5,09	1.506.397,93	4,76	1.502.328,31	4,82		
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	562.514,24	1,89	591.009,80	1,87	603.321,33	1,94		
R,S,T,U	Jasa Lainnya	648.258,72	2,17	631.672,00	2,00	701.050,68	2,25		
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		29.832.688,44	100,00	31.661.247,01	100,00	31.167.290,13	100,00		
Tanpa Sub komponen Pertambangan bijih Logam		25.502.745,70		27.644.001,29		27.526.764,92			

Keterangan: *) : data sangat sementara
Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa peranan sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor Listrik dan air bersih yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM terhadap pembentukan PDRB di Provinsi NTB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan 7,77% untuk sub sektor pertambangan dan penggalian dibandingkan tahun 2017. Sedangkan untuk sub sektor listrik dan air bersih mengalami penurunan 0,01% dibandingkan dengan tahun 2017. Secara keseluruhan peran sektor ESDM melalui sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor air bersih untuk tahun 2018 berada di posisi ketiga dibawah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor lapangan usaha perdagangan dan perbengkelan.

Peranan sub sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan sebesar 18,63% pada tahun 2012; 17,49% tahun 2013; 14,39% tahun 2014; 19,07% tahun 2015; 22,18% tahun 2016; 19,45% tahun 2017 dan 11,68% untuk tahun 2018 (s/d triwulan III 2018). Sedangkan sub sektor listrik dan air bersih peranannya masih sangat kecil yaitu sebesar 0,51% pada tahun 2012; 0,52% tahun 2013; 0,59% tahun 2014; 0,15% tahun 2015; 0,16% tahun 2016; 0,16% tahun 2017 dan 0,15% Tahun 2018 (s/d triwulan III 2018) [www.ntb.bps.go.id].

Sektor ESDM mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengisi pembangunan secara khusus di NTB, mengingat potensi ESDM yang dimiliki daerah ini relatif besar, khususnya komoditi tambang mineral dan batuan. Provinsi NTB ini menjadi salah satu daerah penghasil produk mineral di Indonesia, utamanya logam dasar dan mineral industri. Dari sub sektor energi dan ketenagalistrikan Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan seperti panas bumi, energi air, energi angin dan energi matahari.

B. Landasan Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintah Daerah

sesuai herarki. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
21. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Kewenangan Provinsi pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi mengalami perubahan yang sangat signifikan pada beberapa sub urusan pemerintahan. Sebagai turunannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk perangkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan pembentukan Perangkat Daerah yang salah satu Dinas yang dibentuk adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (u) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebutkan bahwa: “Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Lebih lanjut disebutkan dalam Lampiran II, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB, menyebutkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2018 didukung oleh 90 personil, yang terdiri dari 10 orang golongan IV, 62 orang golongan III dan 22 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 12 orang pasca sarjana (S2), 42 orang sarjana (S1), 4 orang sarjana muda (D3), 8 orang berpendidikan SMK, 25 orang berpendidikan SMU, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2018.

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D3	SMK	SMU	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	2	4	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
Eselon IV	5	12	0	0	0	0	0	17	1	12	0	0
Fungsional Tertentu	0	3	0	4	0	0	0	7	0	7	0	0
Fungsional Umum	4	21	2	4	25	3	0	59	2	40	21	0
JUMLAH	12	40	2	8	25	3	0	90	10	59	21	0

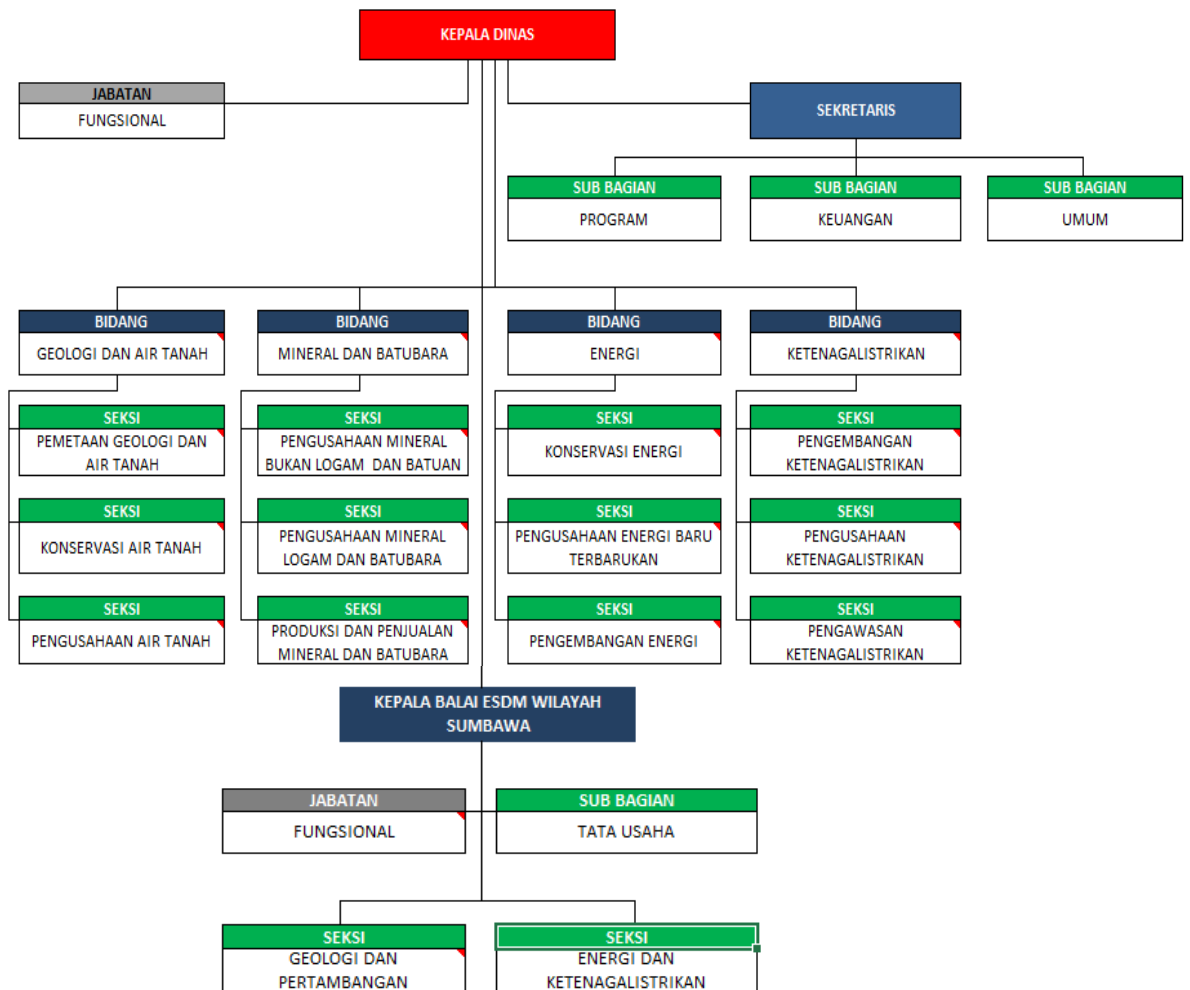
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2018

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 50 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
 - Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - Seksi Pengusahaan Air Tanah;
 - Seksi Konservasi Air Tanah.

- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
 - Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
 - Seksi Produksi, Penjualan Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sumbawa
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Geologi dan Pertambangan;
 - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
 - Jabatan fungsional Perencana;
 - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Perda 11 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Daftar Tabel/Grafik

Daftar Gambar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Operasional
- C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- D. Sitematika Penyusunan Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan
 - 3. Sasaran
 - 4. Indikator Kinerja Utama
- B. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
 - 1. Anggraan Dinas
 - 2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- C. Penghargaan Atas Kinerja Pembangunan

Bab IV Penutup

Lampiran – lampiran

- 1. Rencana Strategis SKPD
- 2. Indikator Kinerja Utama SKPD
- 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- 5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2018
- 6. Laporan Pendukung LAKIP Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perencanaan strategis merupakan proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun. Perencanaan strategis dijabarkan secara sistematis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang sudah direvisi sesuai dengan perubahan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan secara terencana dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi.

A. Perencanaan Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahunan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman Gubernur beserta perangkatnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan. RPJMD juga memuat strategi yang

digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian target sasaran dalam rencana pembangunan.

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dibidangnya. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangannya dalam urusan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM telah menyusun Revisi Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Revisi Renstra tersebut dilakukan sehubungan dengan telah berubahnya kewenangan Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi, Misi dan Tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas adalah sebagai berikut :

1. Visi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu pelaku pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral merumuskan visi yang termuat dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2013-2018 sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT".

Visi tersebut mengandung makna bahwa organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki keinginan yang kuat dalam mengelola urusan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan meminimalisir kerusakan lingkungan melalui integrasi yang harmonis antar sektor.

2. Misi

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas dan fungsi serta pertimbangan terhadap kondisi lingkungan strategis, maka pernyataan misi dalam upaya pencapaian visi dinas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air tanah dan informasi geologi;
2. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara;
3. Meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan listrik;
5. Mendorong upaya peningkatan sinergitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*); dan

6. Mendukung peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha bidang sumber daya mineral dan energi.

3. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Dinas ESDM Provinsi NTB mampu secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan. Memformulasikan tujuan strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai. Untuk mengukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan diikuti dengan indikator kinerja yang terukur. Bertolak dari pernyataan visi dan misi, maka tujuan strategis yang hendak diwujudkan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas data dan informasi peta potensi geologi dan air tanah;
- 2) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan air tanah;
- 3) Meningkatnya efektifitas Pengelolaan air tanah;
- 4) Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara;
- 5) Meningkatnya efektifitas Pengendalian usaha Pertambangan;
- 6) Meningkatnya kualitas Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
- 7) Meningkatnya produktifitas dan kapasitas energi baru terbarukan;
- 8) Meningkatnya efektifitas perusahaan energi baru terbarukan;
- 9) Meningkatnya efektifitas pemanfaatan Energi
- 10) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perusahaan ketenagalistrikan
- 11) Meningkatnya produktifitas dan kapasitas tenaga listrik
- 12) Meningkatnya efektifitas pengawasan usaha bidang ketegalistrikan
- 13) Meningkatnya kualitas Program dan laporan
- 14) Meningkatnya kualitas laporan keuangan;
- 15) Meningkatnya kualitas laporan kepegawaian;
- 16) Meningkatnya efektifitas tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral
- 17) Meningkatnya efektifitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara

- 18) Meningkatnya efektifitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan

4. Strategi Pokok Pembangunan.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi dalam hal ini lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun kebijakan merupakan tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapai keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dinas. Adapun strategi yang diterapkan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mitigasi bencana dan menciptakan masyarakat tanggap bencana geologi;
2. Konservasi pemanfaatan sumber air tanah melalui pemetaan potensi air tanah dan Cekungan Air Tanah (CAT) dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di perdesaan;
4. Inventarisasi keanekaragaman geologi dalam rangka pengembangan *Geopark*;
5. Mendorong penerapan prinsip penambangan yang baik dan benar *Good Mining Practise*;
6. Mendorong upaya Peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian;
7. Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan guna mewujudkan peningkatan cakupan Listrik;
8. Rekomendasi teknis dalam rangka pemberian izin usaha bidang ESDM;
9. Koordinasi/konsultasi dan pembentukan tim penyusunan dokumen rancangan Perda RUED;
10. Diversifikasi pemanfaatan energi melalui pengembangan Biogas;
11. Sosialisasi konservasi energi;
12. Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca.
13. Penyuluhan perizinan bidang ketenagalistrikan;
14. Fasilitasi pemasangan listrik murah dan hemat untuk rumah tangga kurang mampu;
15. Penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);

16. Penerapan prinsip laporan keuangan yang akuntabel berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah;
17. Peningkatan disiplin aparatur;
18. Reformasi birokrasi ;

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut ditempuh melalui 5 (lima) strategi pokok pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas 2013-2018, yakni sebagai berikut:

- **Optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber energi lokal guna mewujudkan peningkatan Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) dan pemantapan ketahanan energi daerah**, melalui kebijakan diversifikasi pemanfaatan sumber daya energi; pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan listrik bagi masyarakat yang belum dilalui jaringan listrik PLN; memberikan akses listrik kepada masyarakat miskin yang sudah dilalui jaringan listrik PLN namun belum menikmati listrik; mengembangkan potensi biogas sebagai energi alternatif yang bersinergi dengan program Bumi Sejuta Sapi (BSS); dan mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur energi guna menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;
- **Peningkatan akses air bersih yang berkeadilan guna terwujudnya dukungan peningkatan cakupan air bersih**, melalui kebijakan konservasi sumber daya air tanah demi menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air tanah; melindungi fungsi air dalam mendukung kehidupan ekosistem berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitas; mendukung upaya penegakan hukum atas kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air; mengendalikan eksploitasi pemanfaatan air tanah, mendorong perlunya pengelolaan sumberdaya air yang terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- **Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi serta laju pertumbuhan investasi dibarengi dengan antisipasi menurunnya kualitas lingkungan hidup**, melalui kebijakan upaya konservasi potensi sumber daya geologi; Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan mineral dan batubara; penegakan hukum bidang pertambangan mineral dan batubara; Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertambangan mineral dan batubara;
- **Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan penerapan lptek**; Revitalisasi perangkat Sistem Informasi Geografis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral; inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang energi dan sumber daya mineral; penyediaan informasi sektor energi dan sumber daya mineral melalui *website* dinas.

- **Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia selaku pengelola urusan energi dan sumber daya mineral serta penguatan kapasitas kelembagaan**, melalui kebijakan optimalisasi pendayagunaan sumber daya aparatur yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen, pengembangan potensi dan kapasitas aparatur, serta administrasi kepegawaian; Mengikutsertakan aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; meningkatkan peran organisasi dalam upaya mitigasi bencana geologi; koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan *stakeholder* terkait.

5. Program Pembangunan Tahun 2018

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2018 telah menjalankan kebijaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada program Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sebagai program utama dengan sasaran “*terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai*”. Sasaran tersebut diterjemahkan melalui peningkatan Cakupan Listrik (*Rasio Elektrifikasi*) dengan melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi, dimana dengan pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dapat mengatasi permasalahan ketenagalistrikan guna memperkuat Ketahanan Energi Daerah dan meningkatkan peran energi terbarukan dalam bauran energi.

Selain itu peningkatan cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung dimana Dinas ESDM telah berkontribusi dalam mendukung sasaran kebijakan tersebut bersama perangkat daerah terkait lainnya. Cakupan air bersih merupakan rasio jumlah penduduk Provinsi NTB yang mendapat akses air bersih, dibanding dengan jumlah total penduduk NTB. Besar kontribusi diterjemahkan melalui jumlah kepala keluarga (KK) atau jiwa yang mendapat pelayanan air bersih terutama pada lokasi pembangunan infrastruktur sumur bor di daerah kritis air dan daerah kantong kekeringan.

Demikian pula halnya dengan program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditujukan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan investasi, sebagai salah satu program pendukung, yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Provinsi NTB 2013-2018.

Program yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB pada hakekatnya adalah merupakan penjabaran dari pada program Renstra

Perangkat Daerah 2013 – 2018 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi dan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 telah diusulkan program/kegiatan, melalui dana APBD Provinsi NTB yang merupakan prioritas pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral.

Program/Kegiatan APBD

Program/kegiatan Dinas ESDM Provinsi NTB yang diusulkan tahun 2018 melalui pembiayaan APBD terdiri atas 11 (sebelas) program yang mencakup 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan, sebagai berikut:

1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan tersedianya layanan ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan publik, dengan indikator sasaran tersedianya sarana pendukung dan jasa penunjang operasional administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga Perangkat Daerah. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
 - j. Penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - k. Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur. Indikator sasaran adalah tersedianya dan terpeliharanya peralatan penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sasarannya diharapkan teralisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengadaan UPS / Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik, dengan indikator kinerja tersedianya 5 unit peralatan penunjang kerja kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 unit Gedung Kantor, dengan indikator kinerja berfungsinya gedung kantor dinas, bidang dan balai secara optimal sebanyak 1 paket;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan indikator kinerja berfungsinya secara optimal 23 unit sarana transportasi kantor;

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala 7 unit Peralatan Kantor, dengan indikator kinerja berfungsinya peralatan dan fasilitas kerja kantor.
3. ***Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur***, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat di bidang energi dan sumberdaya mineral. Indikator sasaran adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, fisik dan disiplin bagi aparatur sehingga tercapai peningkatan kinerja aparatur. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur selama 12 bulan, dengan indikator Terwujudnya 97 aparatur yang tangguh secara mental dan fisik;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja diterapkannya standardisasi, pengukuran, sertifikasi dan pendidikan pelatihan berdasarkan kompetensi untuk jabatan teknis tertentu dan jabatan fungsional.
4. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan urusan ESDM. Indikator sasaran adalah terwujudnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan Anggaran yang akuntabel, serta dokumen perencanaan yang berkualitas. Sasaran diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator kinerja dilaksanakannya evaluasi pencapaian kinerja kepala SKPD berdasarkan penetapan kinerja sebanyak 1 dokumen;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun, dengan indikator kinerja tersedianya 1 dokumen penyerapan dan realisasi anggaran;
 - c. Penyusunan Renstra dan Rencana Kinerja OPD, dengan indikator kinerja tersedianya 4 dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan agenda kebijakan daerah. Dokumen tersebut terdiri dari Rencana Kerja OPD Tahun 2019, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2018, Rencana Kegiatan dan Anggaran 2019 dan Dokumen Renstra Dinas ESDM Tahun 2018-2023 dan ditandatanganinya penetapan kinerja OPD antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah, serta antara Kepala OPD dengan bawahannya secara berjenjang.
5. ***Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan tertibnya pengelolaan aset Barang milik Daerah (BMD), dengan indikator sasaran tersedianya 1 dokumen Laporan Aset BMN/BMD. Sasaran ini diharapkan terealisasi 100%;
6. ***Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan***, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining*

practices) dengan indikator sasaran tersedianya arahan kebijakan perusahaan pertambangan dan tertib administrasi perizinan di Provinsi NTB, terlaksananya pengawasan usaha pertambangan dan bimbingan bagi pelaku tambang mandiri. Sasaran ini diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan, dengan indikator capaian meningkatnya pemahaman 50 orang pemangku kepentingan terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Perusahaan Pertambangan, dengan indikator capaian: Dokumen pembinaan perizinan dan pengendalian perusahaan pertambangan;
 - c. Pengawasan Usaha Pertambangan, dengan indikator capaian Dokumen pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dimana melalui kegiatan tersebut diharapkan terwujudnya kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan serta pelaksanaan *Good Mining Practises* oleh pelaku usaha pertambangan;
 - d. Peningkatan Kapasitas Penambang, dengan indikator capaian Meningkatnya kualitas 1 Kelompok Usaha Tambang Mandiri.
7. ***Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan***, bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai beberapa tahun kedepan melalui kegiatan:
- a. Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator capaian tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan terkait pemanfaatan tenaga listrik sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, dengan indikator capaian tersedianya sambungan listrik murah dan hemat bagi 480 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan terbangunnya 9 unit Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya;
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan dengan indikator capaian tersusunnya 1 dokumen pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan.
8. ***Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan cakupan air bersih melalui pemanfaatan air tanah dan pengendalian pemanfaatan air tanah dan konservasi air tanah melalui kegiatan :
- a. Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah dengan indikator tersedianya 1 dokumen perencanaan teknis terkait pemanfaatan air tanah;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah melalui pembangunan 3 unit sumur bor produksi untuk melayani air bersih bagi 255 KK di Kab. Lombok Timur dan Kab. Dompu.

- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah pada kegiatan pengusahaan pemanfaatan air tanah dengan indikator tersedianya laporan pengawasan pemanfaatan air tanah.;
9. ***Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral***, bertujuan untuk mengaktualisasikan pengelolaan ESDM pada aspek teknis maupun administratif, dengan indikator sasaran terciptanya iklim usaha bidang pertambangan yang kondusif. Sasaran ini diharapkan bisa terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersedianya 1 dokumen usulan perencanaan Program/Kegiatan SKPD guna terwujudnya sinergi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang pertambangan dan energi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersedianya data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral yang tervalidasi dari waktu ke waktu yang dipublikasi melalui *web* dinas;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan indikator capaian tersusunnya 3 dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan SKPD sebagai hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Energi dan Sumber daya Mineral baik internal maupun eksternal;
10. ***Program pencegahan kerusakan lingkungan***, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana alam geologi sekaligus mensosialisasikan potensi keragaman geologi kepada masyarakat khususnya pelajar, dengan indikator sasaran tersedianya informasi kejadian bencana alam geologi dan terlaksananya sosialisasi/penyuluhan geopark kepada masyarakat/pelajar. Sasaran ini diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Mitigasi Rawan Bencana Alam Geologi, dengan indikator capaian Dokumen informasi kejadian bencana alam geologi.
 - b. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi, dengan indikator capaian Tersosialisasikannya pemahaman informasi geopark kepada masyarakat/pelajar sebanyak 600 orang; Tersedianya papan informasi Geopark Tambora sebanyak 3 buah.
11. ***Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pendayagunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif, dengan indikator kinerja terwujudnya peningkatan cakupan listrik (Rasio Elektrifikasi) yang bersumber dari pemanfaatan energi baru terbarukan. Sasaran ini diharapkan terealisasi 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan, dengan indikator tersedianya dokumen Rencana Umum Energi Daerah.
- b. Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dengan indikator capaian terbangunnya 1 unit PLTS Terpusat 15 kWp di Kab. Sumbawa; Terehabilitasinya PLTS Komunal 15kWp di Kab. Lombok Barat; terbangunnya 101 unit biogas di Kab. Lombok Barat; terbangunnya 150 unit biogas di Kab. Lombok Tengah; terbangunnya 138 unit biogas di Kab. Lombok Timur.
- c. Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi, dengan indikator capaian tersosialisasikannya peraturan yang terkait dengan perijinan dan konservasi energi kepada masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) tingkat OPD, sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, Renstra 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut

adalah Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2018:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi)	Rasio elektrifikasi	75,00%
	Prosentase kontribusi ebt dalam RE	1,60%
Mendukung peningkatan cakupan air bersih	Jumlah penduduk yang menikmati air bersih	255 KK
	Peninngkatan prosentase kontribusi cakupan layanan air bersih	0,06%

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) diperlukan dukungan program/kegiatan dan anggaran yang menyertainya. Berikut ini disajikan program/kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan :

Rencana Kinerja yang dilaksanakan di tahun 2018 sebagai uraian dari Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya Peningkatan Cakupan Listrik	a. Tercapainya Rasio Elektrifikasi (cakupan listrik)	75 %
	b. Terbinanya dan terawasinya kegiatan usaha bidang ketenagalistrikan	1 Dokumen
	c. Tersedianya dokumen perusahaan ketenagalistrikan	1 Dokumen
	d. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk masyarakat kurang mampu	450 RTS
2. Tersedianya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan	a. Tersedianya dokumen evaluasi RAD GRK	1 Dokumen
	b. Tersedianya infrastruktur energi baru terbarukan	391 Unit
	c. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	150 Orang
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelompok Penambang	a. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan	50 Orang
	b. Terlaksananya pembinaan perizinan perusahaan pertambangan	1 Dokumen
	c. Terawasinya kegiatan usaha pertambangan	1 Dokumen
	d. Terbinanya kelompok penambang batuan	2 Kelompok
4. Terwujudnya Peningkatan Cakupan Air Bersih	a. Tersusunnya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	1 Dokumen
	b. Terbangunnya sumur bor produksi	3 Unit
	c. Tersedianya dokumen perusahaan air tanah	1 Dokumen
5. Terwujudnya Penurunan Resiko Kerugian/Korban	a. Tersedianya informasi kejadian Bencana Alam Geologi	1 Dokumen

Sasaran Strategis (1)		Indikator Kinerja (2)	Target (3)
	Akibat Bencana Alam Geologi dan Terjaganya Keanekaragaman Geologi	b. Tersedianya data dan tersebarnya informasi geopark dan potensi kawasan lindung geologi	300 Orang 4 Unit
6.	Tersedianya Sarana Pendukung dan Jasa Penunjang Operasional 1. Administrasi dan Ketatalaksanaan Rumah Tangga Dinas ESDM	a. Terlaksananya surat menyurat dinas	1200 Lembar
		b. Tersedianya Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah, Internet dan Website	12 Bulan
		c. Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		d. Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan
		e. Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor	12 Bulan
		f. Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
		g. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		h. Tersedianya komponen listrik/penerangan	12 Bulan
		i. Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan
		j. Terlaksananya rapat/koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	12 Bulan
		k. Terlaksananya rapat/koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan
7.	Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan Penunjang Dalam Rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	a. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik	1 Paket
		b. Terpeliharanya kendaraan dinas	22 Unit
		c. Terpeliharanya peralatan kantor	7 Unit
8.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Terbinanya mental dan fisik aparatur	92 Orang
		b. Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur	3 Orang
9.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	a. Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen
		b. Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
		c. Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan tahunan perangkat daerah	3 Dokumen
10.	Tertibnya Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Aset BMD	1 Dokumen
11.	Terwujudnya perencanaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang tepat sasaran	a. Tersedianya dokumen usulan program/kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen
		b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	3 Dokumen

Tabel 2.3. Program, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp. 1.364.160.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 1 dengan indikator huruf a, b, c dan d
2.	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Rp. 8.446.500.000	Sumber dana APBD dan DAK, mendukung sasaran strategis nomor 2 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
3.	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp. 378.300.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 3 dengan indikator kinerja huruf a, b, c dan d

Program		Anggaran	Keterangan
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Rp. 1.108.765.000	Sumber dana APBD , mendukung sasaran strategis nomor 4 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
5.	Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Rp. 363.350.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 5 dengan indikator kinerja huruf a dan b
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 624.247.600	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 6 dengan indikator kinerja huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 263.570.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 7 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 9.643.200	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 8 dengan indikator kinerja huruf a dan b
9.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 161.586.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 9 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
10.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 20.954.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 10
11.	Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 301.741.800	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 11 dengan indikator kinerja huruf a dan b

Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang dimaksud disini adalah target sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, yang disusun dengan cara mengelompokkan program-program kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama, program/kegiatan yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Rasio Elektrifikasi.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) program/kegiatan diukur berdasarkan prosentase pencapaiannya, baik secara fisik maupun keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur Kinerja Program/Kegiatan adalah indikator sasaran yang ditunjukkan dengan pencapaian target sasaran ditambah dengan penjelasan capaian realisasi keuangan.

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan diukur dari capaian dari target beberapa sasaran program/kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Program Tahun 2018

No	Program dalam DPA	Indikator (Sasaran) Kinerja Kunci	Target	Satuan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana pendukung dan jasa penunjang operasional administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga SKPD	11	Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya peralatan penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	33	Unit
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan Kapabilitas sumberdaya Aparatur melalui Diklat, pembinaan mental, fisik dan disiplin	97	Orang
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya laporan evaluasi capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan Anggaran yang akuntabel, serta dokumen perencanaan yang berkualitas	6	Dokumen
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya pengelolaan aset BMN/BMD	1	Dokumen
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tersedianya arahan kebijakan perusahaan pertambangan yang berpedoman pada prinsip Good Mining Practises	50 1 1 1	orang Dokumen Dokumen Kelompok
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terwujudnya pemanfaatan pembangunan tenaga listrik	1 480 1	Dokumen RTS Dokumen
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai	3	Unit
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral	Terwujudnya aktualisasi pengelolaan ESDM pada aspek teknis maupun administratif guna menunjang laju investasi dan pertumbuhan ekonomi regional	1 1 3	Dokumen Dokumen Dokumen
10	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Terwujudnya Sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi	1 300	Dokumen orang
11	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Terwujudnya peningkatan dan pendayagunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternative	1 391 150	Dokumen unit Orang

Tabel 2.5 Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

No	Kegiatan dalam DPA	Satuan	Vol
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat	1200
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	10
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tahun	1
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	1
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tahun	1
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kanto	Tahun	1
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tahun	1
10	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1
11	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1
12	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Unit	3
13	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tahun	1
14	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	23
15	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	7
16	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Orang	97
17	Peningkatan SDM Aparatur	Orang	11

No	Kegiatan dalam DPA	Satuan	Vol
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1
20	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen	4
21	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Dokumen	1
22	Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan	Orang	50
23	Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Dokumen	1
24	Pengawasan Usaha Pertambangan	Dokumen	1
25	Peningkatan Kapasitas Penambang	Kelompok	1
26	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1
27	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Kelistrikan	RTS	480
28	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1
29	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Dokumen	1
30	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Unit	3
31	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Dokumen	1
32	Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1
33	Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1
34	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	3
35	Pendataan/mitigasi rawan bencana alam geologi	Dokumen	1
36	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Orang	600
37	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan	Dokumen	1
38	Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Unit	391
39	Penyuluhan kegiatan bidang energi	Orang	150

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk Pelaporan Kinerja. LKjIP merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada matriks dibawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi)	Rasio Elektrifikasi	75,00%	93.83%	125,11
	Persentase Kontribusi EBT dalam RE	1,60%	1,62%	101,25%
Mendukung peningkatan cakupan air bersih	Jumlah penduduk yang menikmati air bersih	255 KK	255 KK	100,00
	Peningkatan persentase kontribusi cakupan layanan air bersih	0,06	0,06	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja				112,56

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018, berdasarkan target dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%
			Satuan	Volume		
1	Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik	Rasio Elektrifikasi	%	75,00	93,83	125,11
		Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1	1	100
		Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan untuk Masyarakat Kurang Mampu	RTS	480	480	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%
			Satuan	Volume		
		Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya	Unit	9	9	100
		Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1	1	100
2	Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi tentang Kebijakan Konservasi Energi	Orang	75	75	100
		Dokumen Sosialisasi tentang Kebijakan Konservasi Energi	Dokumen	1	1	100
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang Dibangun	Dokumen	1	1	100
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang direhabilitasi	Unit	1	1	100
		Biogas Skala Rumah Tangga yang Dibangun	Unit	389	389	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyuluhan tentang Perizinan Bidang Energi	Orang	75	75	100
		Dokumen kegiatan penyuluhan tentang perizinan bidang energi	Dokumen	1	1	100
3	Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang memadai	KK	255	255	100
		Jumlah sumur bor produksi air tanah yang dibangun	Unit	3	3	100
4	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kelompok penambang	Tersuluhnya peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara	Orang	50	50	100
		Laporan Bimtek Kader Penyuluh/Pengawas Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100
		Dokumen Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Dokumen	1	1	100
		Dokumen pengawasan kegiatan usaha pertambangan	Dokumen	1	1	100
5	Tertibnya pengelolaan ESDM secara teknis dan administrasi	Sinergisnya perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan				
		Tersedianya dokumen usulan Program/Kegiatan SKPD	Dokumen	1	1	100
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%
			Satuan	Volume		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	100
6	Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tataran Teknis dan Administratif	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	1	100
		Tersedianya data dan informasi Sektor ESDM	Dokumen	1	1	100
		Tersedianya dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	1	100
7	Berkurangnya resiko kerugian/korban akibat bencana alam geologi dan terjaganya keanekaragaman geologi	Terciptanya Masyarakat NTB yang tanggap bencana geologi				
		Tersosialisasinya Pemahaman informasi geopark kepada masyarakat	Orang	600	600	100
		Tersedianya Papan Informasi Geopark	Unit	3	3	100
		Tersedianya Dokumen informasi kejadian bencana alam geologi	Dokumen	1	1	100

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018 berdasarkan target dalam Renja SKPD Tahun 2018

No	PROGRAM	Sasaran Program	KINERJA PROGRAM		
			Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana pendukung dan jasa penunjang operasional administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga SKPD	11	11	91,51
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya peralatan penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	33	33	91,82
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan Kapabilitas sumberdaya Aparatur melalui Diklat, pembinaan mental, fisik dan disiplin	97	97	60,66
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya laporan evaluasi capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan Anggaran yang akuntabel, serta dokumen perencanaan yang berkualitas	6	6	98,51
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya pengelolaan aset BMN/BMD	1	1	99,99
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tersedianya arahan kebijakan perusahaan pertambangan yang berpedoman pada prinsip <i>Good Mining Practises</i>	50	50	99,23
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat kurang mampu	480	480	89,28
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai	3	3	79,00
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber daya Mineral	Terwujudnya aktualisasi pengelolaan ESDM guna menunjang laju investasi dan pertumbuhan ekonomi regional	3	3	95,52
10	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Terwujudnya Sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi	600	600	99,37

No	PROGRAM	Sasaran Program	KINERJA PROGRAM		
			Target	Realisasi	%
11	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Terwujudnya peningkatan dan pendayagunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif	391	391	88,76
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM					90,33

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tahun 2018 berdasarkan target Rencana Kinerja SKPD Tahun 2018

Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Kinerja sasaran kegiatan			
			Satuan	Target	Realisasi	%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya tertib administrasi SKPD	Tahun	1	1	49,71
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya koordinasi tugas-tugas pemerintahan bidang ESDM	Tahun	1	1	71,80
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Tahun	1	1	100,00
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	Tahun	1	1	99,36
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor	Tahun	1	1	96,88
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	100,00
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan penunjang administrasi perkantoran	Tahun	1	1	100,00
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan bangunan kantor	Tahun	1	1	99,79
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tahun	1	1	80,19
1.10	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya sinergitas kegiatan sektor ESDM	Tahun	1	1	99,28
1.11	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memperkuat koordinasi di dalam daerah	Tahun	1	1	98,77
2.1	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas kantor	Unit	5	5	97,23
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Tahun	1	1	99,20
2.3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional OPD	Unit	23	23	90,77
2.4	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai	Unit	7	7	99,95
3.1	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Tercapainya kesehatan dan semangat kerja bagi aparatur	Orang	97	97	25,00
3.2	Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia	Orang	11	11	85,94
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya pengendalian kegiatan SKPD	Dokumen	1	1	96,84
4.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terwujudnya laporan tahunan keuangan	Dokumen	1	1	96,86
4.3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan	Dokumen	4	4	99,44
5.1	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Aset BMD/BMD	Dokumen	1	1	99,99
6.1	Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan	Tersosialisasi dan tersuluhnya kegiatan bidang pertambangan	Orang	50	50	99,08
6.2	Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Terbina dan terkendalinya pengusahaan pertambangan	Dokumen	1	1	98,45

Kegiatan		Sasaran Kegiatan	Kinerja sasaran kegiatan			
			Satuan	Target	Realisasi	%
6.3	Pengawasan Usaha Pertambangan	Terawasinya kegiatan pertambangan	Dokumen	1	1	99,83
6.4	Peningkatan Kapasitas Penambang	Terbinanya kelompok penambang batuan	Kelompok	1	1	100,00
7.1	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	Dokumen	1	1	98,75
7.2	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk masyarakat kurang mampu	RTS	480	480	88,14
7.3	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan	Terkendalinya penggunaan listrik non PLN	Dokumen	1	1	99,99
8.1	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Tersedianya perencanaan teknis pemanfaatan air tanah	Dokumen	1	1	92,09
8.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Tersedianya sarana prasarana pemanfaatan air bersih	Unit	3	3	76,94
8.3	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Dokumen	1	1	97,28
9.1	Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Terwujudnya sinkronisasi data Program/Kegiatan sektor ESDM dengan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	99,15
9.2	Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Terwujudnya data aktual bidang energi dan sumberdaya mineral	Dokumen	1	1	77,43
9.3	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Terkendalinya kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral sesuai rencana	Dokumen	3	3	98,80
10.1	Mitigasi Rawan Bencana Alam Geologi	Tersedianya informasi kejadian bencana alam geologi	Dokumen	1	1	99,97
10.2	Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap geopark	Orang	600	600	99,28
11.1	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan	Terkendalinya arah pengelolaan energi daerah	Dokumen	1	1	71,77
11.2	Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan	Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat yang diperoleh melalui sumber energi baru terbarukan	Unit	391	391	88,72
11.3	Penyuluhan kegiatan bidang energi	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap perijinan dan konservasi di bidang energi	Orang	150	150	99,74
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN						91,60

B. Analisis Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja

Hingga akhir tahun 2018, Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja baik Indikator Kinerja Utama, Kinerja Program dan Kinerja Kegiatan diuraikan dalam analisis tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi)	Rasio Elektrifikasi	75,00%	93,83%	125,11
	Persentase Kontribusi EBT dalam RE	1,60%	1,62%	101,25
Mendukung peningkatan cakupan air bersih	Jumlah penduduk yang menikmati air bersih	255 KK	255 KK	100,00
	Peningkatan persentase kontribusi cakupan layanan air bersih	0,06	0,06	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja				112,56

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian realisasi perjanjian kinerja tahun 2017 yang sebesar 104,28%, capaian dan realisasi perjanjian kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB meningkat 8,28% menjadi 112,56%. Peningkatan terjadi pada capaian rasio elektrifikasi sebesar 93,83% dari target 75,00% atau realisasinya 125,11%. Rasio elektrifikasi merupakan Indikator kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 912-409 Tahun 2014 tentang Penetapan Stuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Berikut disajikan capaian dan realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2017 sebagai pembandingan dalam menganalisis keberhasilan pencapaian target :

Tabel 3.6 Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi)	Rasio Elektrifikasi	72,67%	85,10%	117,10
	Persentase Kontribusi EBT dalam RE	1,60%	1,60%	100,00
Mendukung peningkatan cakupan air bersih	Jumlah penduduk yang menikmati air bersih	765 KK	765 KK	100,00
	Peningkatan persentase kontribusi cakupan layanan air bersih	0,06	0,06	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja				104,28

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian dan realisasi Perjanjian Kinerja Dinas akan dijelaskan melalui analisis yang lebih mendalam melalui beberapa hal sebagai berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang akan memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 di Provinsi NTB yang menetapkan rasio elektrifikasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 912-409 Tahun 2014 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018. IKU merupakan tolok ukur keberhasilan yang menggambarkan capaian strategis dari organisasi. Hasil pengukuran IKU dapat dilihat pada Tabel 3.1. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Elektrifikasi (RE)

Cakupan Listrik atau Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan prosentase penduduk Kepala Keluarga (KK) NTB yang sudah menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2018. Angka rasio elektrifikasi yang dimaksud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Data Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (RT)	RT Berlistrik Non PLN	RE non PLN (%)	RT Berlistrik PLN	RE PLN (%)	RE Total (%)
1	Kota Mataram	130.587	-	-	149.445	114,44	114,44
2	Kab. Lombok Utara	60.711	2.439	4,02	53.649	88,37	92,39
3	Kab. Lombok Barat	192.401	2.811	1,46	158.628	82,45	83,91
4	Kab. Lombok Tengah	280.437	3.551	1,27	254.112	90,61	91,88
5	Kab. Lombok Timur	349.735	3.598	1,03	310.516	88,79	89,81
6	Kab. Sumbawa Barat	36.932	1.179	3,19	33.352	90,31	93,50
7	Kab. Sumbawa	118.175	3.961	3,35	119.000	100,70	104,05
8	Kab. Dompu	60.457	1.979	3,27	62.744	103,78	107,06
9	Kab. Bima	121.111	2.989	2,47	105.800	87,36	89,83
10	Kota Bima	42.331	76	0,18	37.067	87,56	87,56
Total		1.392.877	22.583	1,62	1.284.314	92,21	93,83

Sumber Data : PLN dan Dinas ESDM Provinsi NTB

Dari tabel diatas, sampai akhir tahun 2018 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 5.227.588 jiwa (1.306.897 KK) atau 93,83% dari Penduduk 5.571.508 jiwa (1.392.877 KK). Dengan kata lain

masih ada sekitar 6,17% (343.920 jiwa atau 85.980 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

Selama 5 tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meningkatkan Rasio Elektrifikasi dari 64,43% menjadi 93,83% atau 29,40% atau rata-rata pertahun meningkat sebesar 5,88%. Jika dilihat dari peningkatan capaian Rasio Elektrifikasi maka peningkatan yang paling rendah terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yang hanya 2,48% dan peningkatan yang paling tinggi adalah pada tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu sebesar 8,73%. Peningkatan terendah pada tahun 2013 ke tahun 2014 disebabkan pada tahun tersebut PLN masih mengalami defisit daya dikarenakan pertumbuhan peningkatan ketersediaan daya mampu lebih rendah dari pada pertumbuhan permintaan kebutuhan daya (permintaan pelanggan). Pertumbuhan ketersediaan daya hanya 10% sedangkan permintaan kebutuhan daya sebesar 15,9%. Berbeda dengan kondisi peningkatan Rasio Elektrifikasi tahun 2017 ke tahun 2018 yang relatif tinggi akan di uraikan secara lebih rinci pada paragraf dibawah ini mengenai analisis dan usaha yang telah dilakukan untuk mencapainya.

Target peningkatan RE tahun 2018 dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 75,00% atau meningkat 2,33% dari tahun 2017 sebesar 72,67%. Namun demikian realisasi Rasio Elektrifikasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 93,83%, atau telah melampaui 18,83% dari target Rasio Elektrifikasi tahun 2018 dengan capaian 125,11%. Target ini dicapai melalui layanan listrik konvensional PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Target peningkatan RE direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capaian RE sebesar 93,83%, sebesar 92,21% diantaranya merupakan cakupan RE yang berasal dari PLN secara *on grid* dengan menggunakan pembangkit konvensional (PLTU dan PLTD) serta pembangkit Energi Baru Terbarukan. Sedangkan sisanya sebanyak 1,62% berasal dari energi baru terbarukan *off grid* yang pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (PLTS, PLTMH dan PLT Bayu).

Untuk meningkatkan cakupan listrik dibutuhkan ketersediaan daya yang memadai dan jaringan yang luas. Usaha penyediaan listrik termasuk kedalam kriteria usaha yang padat teknologi dan padat modal, karenanya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi. PLN sebagai perusahaan penyedia energi listrik jaringannya belum menjangkau semua wilayah Provinsi NTB karena minimnya akses menuju

wilayah yang terisolasi. Karenanya untuk melayani kebutuhan energi listrik pada daerah kepulauan dan daerah perbatasan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari tenaga matahari, tenaga air dan tenaga angin dengan pembiayaan yang berasal dari APBN, Anggaran PLN, APBD, dan swasta melalui *Independent Power Producer (IPP)*.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, yang terdiri dari:
 - 1). Pemasangan Listrik Murah dan Hemat (penyambungan listrik gratis) terhadap 480 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan basis data terpadu TNP2K dengan alokasi di Kabupaten Lombok Barat 120 RTS, Kabupaten Lombok Utara 120 RTS, Kabupaten Lombok Tengah 120 RTS dan Kabupaten Lombok Timur 120 RTS. Sampai akhir tahun 2018 telah terealisasi 480 RTS (100%);
 - 2). Pembangunan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 9 unit, dengan lokasi Kab. Lombok Barat 7 unit dan Kota Bima sebanyak 2 Unit. Sampai akhir tahun 2018 telah terealisasi sebanyak 9 unit (100%);
- b. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi, dilaksanakan melalui kegiatan: Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, yang terdiri dari:
 - 1). Pembangunan dan Pemasangan 1 unit PLTS Komunal kapasitas 15 kWp, yang dilaksanakan di Dusun Stema Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
 - 2). Rehabilitasi PLTS Komunal kapasitas 15 kWp di Lebah Suren Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Sampai dengan akhir tahun 2018 telah terlaksana 100%.
- c. Pembangunan Digester Biogas 4 m³ sebanyak 389 unit pada 3 kabupaten terdiri dari Kabupaten Lombok Barat 101 unit, Kabupaten Lombok Tengah 150 unit dan Kabupaten Lombok Timur 138. Sampai akhir tahun 2018 terealisasi sebanyak 389 Unit (100%).

Dukungan Pemerintah Pusat dan Swasta (IPP)

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan urusan bidang ESDM cukup tinggi, seperti halnya untuk pengembangan ketenagalistrikan merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Penyediaan tenaga listrik di NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (*on grid*) dan listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

Target peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan akhir Tahun 2018 direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan selain bersumber dari dana APBD, juga terdapat kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP).

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber pemenuhan tenaga listrik bagi masyarakat yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN di Provinsi NTB dengan Pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dengan kapasitas 15 kWp di Dusun Stema Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. PLTS komunal tersebut melayani 61 KK, 3 fasilitas umum yang terdiri dari Sekolah Dasar, perumahan guru dan masjid serta penerangan jalan umum sebanyak 21 unit.
- b. Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui *Independent Power Producer* (IPP). Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2013 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait. Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan

mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2021.

Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah terlayani dengan baik dimana hingga akhir tahun 2018 seluruh desa di NTB telah terlayani jaringan listrik PLN. Penyediaan tenaga listrik oleh PT. PLN di Wilayah Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi 3 sistem penyediaan ketenagalistrikan yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima dimana untuk neraca daya dari masing-masing sistem tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Neraca Daya Sistem Nusa Tenggara Barat 2017-2018

No	Sistem	Daya Mampu Pasok (MW)		Beban Puncak (MW)		Cadangan Daya (MW)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Lombok	272,72	270,75	216,31	226,17	56,41	44,58
2	Sumbawa	41,80	52,00	37,34	44,06	4,46	7,94
3	Bima	41,10	47,55	41,09	42,73	0,01	4,82
	JUMLAH	355,62	370,30	294,74	312,96	60,88	57,34

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas perkembangan neraca daya dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terlalu signifikan meningkat dan peningkatannya tidak setinggi Rasio Elektrifikasi. Sebagai contoh peningkatan daya mampu dari 355,62 MW ke 370,30 MW atau sebesar 4,13% dapat meningkatkan Rasio Elektrifikasi sebesar 8,73%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Rasio Elektrifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh penambahan kapasitas pembangkit PLN (penambahan daya) saja, tetapi juga dipengaruhi oleh penambahan jaringan PLN yang dapat menjangkau pelanggan di daerah-daerah terpencil dan kemampuan masyarakat untuk memasang jaringan listrik PLN (kemampuan ekonomi masyarakat). Disisi lain terjadi penurunan daya mampu pada ketenagalistrikan sistem Lombok dari 272,72 MW turun menjadi 270,75 MW tidak mempengaruhi peningkatan Rasio Elektrifikasi karena walaupun terjadi penurunan kapasitas daya mampu sebesar 1,97 MW dan mengurangi secara signifikan cadangan daya dari 56,41 MW pada tahun 2017 menjadi 44,58 MW atau turun 11,38 MW namun pada kenyataannya Rasio Elektrifikasi masih dapat meningkat sebesar 8,73%. Peningkatan Rasio Elektrifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan daya mampu PLN saja tetapi juga dipengaruhi oleh perluasan jaringan PLN untuk menjangkau pelanggan baru dan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mampu untuk memasang listrik melalui jaringan listrik PLN yang menjangkau dekat rumahnya.

Kembali pada perkembangan pembangunan ketenagalistrikan di Provinsi NTB, dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, capaian Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2018 sebesar 93,83%, telah melampaui target Rasio Elektrifikasi sebesar 18,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%, sehingga capaiannya sebesar 125,11%. Bencana gempa bumi yang terjadi di pulau Lombok dan pulau Sumbawa berdampak terhadap penurunan Rasio Elektrifikasi akibat rusaknya fasilitas penyediaan listrik baik di sisi pelanggan rumah tangga maupun pada sisi jaringan penyediaan listrik milik PT. PLN. Penurunan Rasio Elektrifikasi NTB terjadi pada bulan September 2018 yaitu sebesar 0,26% jika dibandingkan dengan capaian Rasio Elektrifikasi di Bulan Agustus 2018. Namun demikian secara umum peningkatan Rasio Elektrifikasi untuk tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 lebih tinggi dimana pada tahun 2018 kenaikan sebesar 8.73% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 7.21% jika dibandingkan dengan capaian periode tahun sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi RE selama kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi NTB Tahun 2013-2018

Indikator Kinerja		Sat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Target	%	52,00	65,68	68,01	70,34	72,67	75,00
	Realisasi		64,43	66,91	72,67	77,89	85,10	93,83
	Capaian		123,90	101,87	106,85	110,73	117,10	125,11

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Tahun 2018



Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018



Gambar 3.2 Grafik Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2013-2018

2. Kontribusi Terhadap Peningkatan cakupan Air Bersih

Cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung, pada indikator ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pendukung strategis, bersama Dinas LHK, BPBD dan Dinas Sosial, sementara sebagai SKPD utama pengelolanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Cakupan air bersih merupakan prosentase jumlah penduduk NTB yang dapat menikmati air bersih, angkanya diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih dibanding dengan jumlah seluruh penduduk NTB dikalikan 100%.

Cakupan air bersih terdiri dari dua macam yaitu cakupan air bersih perkotaan dan cakupan air bersih perdesaan. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung cakupan air bersih perdesaan dimana untuk tahun 2018 ditargetkan untuk dapat melayani sebanyak 255 KK sesuai dengan permintaan masyarakat yang pemenuhan akan sumber air bersih masih kurang mencukupi.

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi cakupan air bersih perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah berupa pembangunan sumur bor produksi. Pembangunan sumur bor pada 3 (tiga) lokasi di 2 (dua) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 unit sumur bor yaitu masing-masing di Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra.
- b. Kabupaten Dompu sebanyak 2 unit sumur bor masing-masing di Desa Doro Kobo, Kecamatan Kempo dan Desa Doro Ncanga Kecamatan Pekat.

Berdasarkan debit air pada masing-masing sumur bor, dapat diketahui kemampuan menyuplai air tanah dengan asumsi 85 KK/sumur bor. Sumur bor yang bisa langsung dimanfaatkan pada tahun 2018 ini berjumlah 3 unit sumur bor yang dibangun dengan pembiayaan APBD Provinsi NTB, yang seluruhnya berjenis sumur bor produksi. Dari sini dapat diasumsikan bahwa seluruh sumur bor yang telah selesai dibangun sampai dengan akhir TA.2018 sebanyak 3 unit dapat menyuplai air kepada 255 KK. Dengan demikian, target tahun 2018 yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2013-2018 berjumlah 600 KK belum dapat terlampaui dengan capaian 42,5%. Tidak tercapainya target pembangunan sumur bor berdasarkan target yang terdapat di Renstra SKPD akibat adanya rasionalisasi anggaran belanja OPD. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai SKPD Pendukung kinerja peningkatan cakupan air bersih perdesaan sampai

dengan akhir tahun 2018 ini mampu berkontribusi terhadap pemenuhan air bersih bagi 255 KK.

Dibandingkan dengan kontribusi capaian cakupan air bersih tahun 2017 sebesar 765 KK atau 0,23%, capaian kontribusi cakupan air bersih tahun 2018 hanya sebesar 255 KK atau 0.06%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan fiskal yang mengharuskan anggaran penyediaan air bersih yang bersumber dari air bawah tanah menjadi berkurang. Keterbatasan fiskal tersebut disebabkan diantaranya oleh adanya alokasi anggaran untuk keperluan pemilu kepala daerah, yang berakibat akan mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

3. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan laju investasi melalui usaha pertambangan mineral dan batubara

Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III tahun 2018 kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 11,68% turun 7,77% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 19,45%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian untuk tahun 2018 menjadi penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan perumahan adalah tingginya kebutuhan bahan galian terutama batuan. Eksploitasi terhadap komoditi pertambangan batuan yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi bahan baku utama pembangunan menyebabkan munculnya kegiatan penambang baik perorangan maupun kelompok di seluruh Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi telah mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU Minerba harus direvisi menyesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tersebut. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan, penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah

pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah perusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara yang meliputi, perencanaan Wilayah Pertambangan, WIUP, IUP, Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, Usaha Jasa Pertambangan, Divestasi, Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan, Keadaan Memaksa dan Penyelesaian Sengketa, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Reklamasi dan Pasca Tambang, Penyidikan, penerapan Pidana dan Sanksi. Perda tersebut disahkan pada tanggal 20 Februari 2012, dengan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ruang lingkup tersebut perlu disesuaikan lagi sejalan dengan perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi perusahaan mineral logam hingga tahun 2018 dengan terbitnya IUP Khusus Operasi Produksi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan luas lahan IUP OP sebesar 25.000 Ha di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyesuaian Kontrak Karya yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan satu Kontrak Karya milik PT. Sumbawa Timur Mining yang belum disesuaikan menjadi IUP.

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2018 sebanyak 261 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari : 25 IUP Mineral Logam, 235 IUP Batuan dan 1 IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Penjualan.

Untuk IUP Mineral Logam terdiri dari komoditi emas (Au), tembaga (Cu), perak (Ag), Mangan (Mn), Pasir dan bijih besi (Fe), serta timah hitam/galena (Pb). Dimana terdapat 17 IUP yang sudah memasuki masa Operasi Produksi dan 3 IUP yang masih dalam tahap eksplorasi.

Tabel 3.10 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sampai 31 Desember 2018

NO	ID KAB	PROVINSI	IUP												TOTAL IUP dan IPR
			MINERAL LOGAM					MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN				
			EK SP	OP	OP KHUSUS PENGOLAHAN	IPR	JML	EKSP	OP	JML	EKSP	OP	IUP OPK	JML	
1	5200	PROV. NUSA TENGGARA BARAT													
2	5201	LOMBOK BARAT	1	2	0	0	3	0	0	0	3	25	2	30	33
3	5202	LOMBOK TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	2	16	16
4	5203	LOMBOK TIMUR	0	1	0	0	1	0	0	0	13	86	3	102	103
5	5204	SUMBAWA	1	5	0	0	6	0	0	0	8	26	2	36	42
6	5205	DOMPU	0	2	1	5	8	0	0	0	2	13	1	16	24
7	5206	BIMA	0	6	0	0	6	0	0	0	0	5	0	5	11
8	5207	SUMBAWA BARAT	1	1	0	0	2	0	0	0	1	14	2	17	19
9	5208	LOMBOK UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	8	8
10	5271	MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5272	KOTA BIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL			3	17	1	5	26	0	0	0	34	188	13	235	261

Sumber ; Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2018

Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III tahun 2018 kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 11,68% turun sebesar 7,77% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 19,45%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang ketiga terbesar terhadap PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan minerba masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi.

Terkait penerimaan negara yang berasal dari luran Tetap Pemegang IUP Logam di Provinsi NTB untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.11 Rekapitulasi Piutang Negara dari luran Tetap (Landrent) Pemegang IUP Logam sampai dengan bulan Desember 2018

NO	KABUPATEN	JUMLAH IUP	PIUTANG PNBP POKOK		PIUTANG PNBP POKOK + DENDA	
			Rp.	USD	Rp.	USD
DAFTAR IUP EXISTING						
1	BIMA	6	811,034,608	414,870	1,343,697,697	639,195
2	DOMPU	2	15,593,328	14,200	17,131,910	25,519
3	SUMBAWA	6	-	188,741	-	259,072
4	SUMBAWA BARAT	2	-	-	39,585,806	69,594
5	LOMBOK TIMUR	1	-	-	-	2,379
6	LOMBOK BARAT	3	-	9,106	-	15,681
	JUMLAH	20	811.034.608	626.916	1.400.415.414	1.011.438

NO	KABUPATEN	JUMLAH IUP	PIUTANG PNBP POKOK		PIUTANG PNBP POKOK + DENDA	
			RUPIAH	DOLLAR	RUPIAH	DOLLAR
DAFTAR IUP SUDAH BERAKHIR						
1	BIMA	8	643,571,069	454,380	1,245,013,287	631,661
2	DOMPU	13	192,460,872	349,765	335,130,475	481,515
3	SUMBAWA	12	131,403,500	912,480	276,781,817	1,454,630
4	SUMBAWA BARAT	4	36,926,342	50,453	64,000,893	81,144
5	LOMBOK BARAT	11	18,278,000	43,381	29,381,105	58,762
	JUMLAH	48	1,022,639,783	1,810,458	1,950,307,578	2,707,713

C. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Secara umum peningkatan/penurunan Kinerja dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama, pencapaian Indikator Kinerja Program dan indikator Kinerja Kegiatan.

Analisis pencapaian indikator kinerja utama merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dari hasil capaian perjanjian kinerja didapat rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 112,56% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 104,28%.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB 2017-2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan listrik (rasio elektrifikasi)	Rasio Elektrifikasi	72,67%	85,10%	117,10	75,00%	93,83%	125,11
	Persentase Kontribusi EBT dalam RE	1,60%	1,60%	100,00	1,60%	1,62%	101,25
Mendukung peningkatan cakupan air bersih	Jumlah penduduk yang menikmati air bersih	765 KK	765 KK	100,00	255 KK	255 KK	100,00
	Peningkatan persentase kontribusi cakupan layanan air bersih	0,06	0,06	100,00	0,06	0,06	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja				104,28			112,56

Beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan capaian perjanjian kinerja antara 2017-2018 terkait dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama diantaranya adalah :

1. Peningkatan Rasio Elektrifikasi selama tahun 2018 sebesar 8,73% disebabkan adanya faktor-faktor pendukung :
 - a. Kondisi kelistrikan Provinsi NTB semakin handal.
 - b. Daya Mampu pembangkit listrik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
 - c. Adanya perluasan jaringan listrik PLN yang menjangkau hingga pelosok perdesaan yang sebelumnya tidak teraliri listrik.
 - d. Peningkatan ekonomi masyarakat berdampak pada peningkatan kebutuhan akan listrik, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN dengan perluasan jaringan PLN dapat melistriki daerah terisolir.
 - e. Bagi masyarakat yang telah dialui oleh jaringan listrik namun tidak mampu memasang listrik, Pemerintah Provinsi NTB telah

memfasilitasinya melalui Program Listrik Murah dan Hemat dengan memberikan pemasangan sambungan listrik bersubsidi gratis.

- f. Bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, Pemerintah Provinsi NTB memfasilitasi dengan pemasangan listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan secara bertahap.
2. Kontribusi terhadap capaian kinerja pendukung Cakupan Air Bersih.
Dinas ESDM Provinsi NTB merupakan Dinas pengelola pendukung dalam upaya mencapai target indikator kinerja Cakupan Air Bersih yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat tidak hanya berasal dari sumber air permukaan dan mata air. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi, Dinas ESDM mempunyai tugas pokok fungsi diantaranya mengelola air yang bersumber dari air tanah. Kontribusi Dinas ESDM tahun 2018 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 hanya mendapat alokasi anggaran untuk membuat 3 unit sumur bor yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 255 KK saja atau 0,06% dari jumlah penduduk NTB, sedangkan pada tahun 2017 Dinas ESDM telah memabangun 9 unit sumur bor yang dapat memenuhi kebutuhan 765 KK atau 0,24% dari jumlah penduduk NTB.

Capaian dan realisasi perjanjian kinerja tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Cakupan Air Bersih juga dipengaruhi oleh stakeholder lainnya yang mendukung pencapaiannya seperti :

1. Kinerja PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
3. *Independent Power Producer* (IPP), pembangkit listrik swasta yang memasok energi listrik ke PLN.
4. Partisipasi dari lembaga Non Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar energi, listrik dan air masyarakat seperti : Hivos, Yayasan Rumah Energi, Islamic Relief, Planet Water dan lain-lain.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/biaya yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam pengertian lain menurut SP Hasibuan (1984) efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Untuk menggambarkan hubungan antara sumber daya baik manusia dan anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Dinas yang optimal berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan jumlah personil yang digunakan, jumlah anggaran yang digunakan dan hasil kinerja berupa Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi dan Indikator Kinerja Pendukung Cakupan Air Bersih yang disajikan dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018 :

Tabel 3.13 Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2017-2018

No	URAIAN	2017		2018	
		Anggaran/Target	Realisasi	Anggaran/Target	Realisasi
1	Jumlah Sumber Daya Manusia	94 Orang	94 Orang	90 Orang	90 Orang
2	Anggaran	Rp. 26.347.132.000	Rp.24.253.599.631	Rp.21.594.060.300	Rp.19.463.617.200
3	Belanja Langsung	Rp. 18.061.481.000	Rp.16.647.130.482	Rp.13.042.817.600	Rp.11.614.758.720
4	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.345.651.000	Rp. 7.606.469.149	Rp. 8.209.306.000	Rp. 7.516.363.440
5	Realiasi Keuangan		92,05%		90,13%
6	Indikator Kinerja Utama				
	- Rasio Elektrifikasi (%)	72,67%	85,10%	75,00%	93,83%
	- Kontribusi EBT dalam RE (%)	1,60%	1,60%	1,60%	1,62%
	- Capaian RE		117,10%		125,11%
7	Indikator Kinerja Pendukung				
	- Cakupan Air Bersih (KK)	765 KK	765 KK	255 KK	255 KK
	- Capaian Cakupan Air Bersih		100%		100%
	- %	0,06%	0,06%	0,23%	0,23%

Dari tabel diatas pada tahun 2017 jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas berupa Rasio Elektrifikasi dan Cakupan Air Bersih dengan jumlah personil sebanyak 94 sebesar Rp. 24.253.599.631,- dengan realisasi keuangan 92,05% hanya dapat meningkatkan capaian Rasio elektrifikasi sebesar 117,10% saja dari target tahun 2017. Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas berupa Rasio Elektrifikasi dan Cakupan Air Bersih dengan jumlah personil sebanyak 90 sebesar Rp. 19.463.617.200,- dengan realisasi keuangan hanya 90,13% dapat meningkatkan capaian Rasio Elektrifikasi sebesar 125,11% dari target 2018. Pada Tahun 2017 dengan anggaran dan sumber daya manusia yang digunakan lebih banyak dari pada tahun 2018 menghasilkan kinerja yang lebih rendah daripada tahun 2018 yang menggunakan sumberdaya manusia dan anggaran yang lebih rendah dari anggaran tahun 2017.

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah sumber daya dan anggaran dinas terhadap kinerja dinas. Ada banyak faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas faktor terbut diantaranya adalah :

1. Kinerja stakeholder lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi seperti : PLN, Sektor penyedia energi listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan air.

D. Realisasi Anggaran

Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Tabel 3.14 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung melalui APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan SKPD

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
2.03.01	BELANJA			21.594.060.300	19.463.617.200	90,13	100,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Satuan	1	8.209.306.000	7.516.363.440	91,56	100,00
5.1.1	Belanja Pegawai	Tahun	1	8.209.306.000	7.516.363.440	91,56	100,00
	Gaji dan Tunjangan	Bulan	14	6.053.531.000	5.506.901.190	90,97	100,00
	Tambahan Penghasilan PNS	Bulan	13	2.155.775.000	2.009.462.250	93,21	100,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	Satuan		13.042.817.600	11.614.758.720	89,05	100,00
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11	624.247.600	571.266.146	91,51	100,00
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	1.200	6.960.000	3.460.000	49,71	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	139.500.000	100.154.422	71,80	100,00
5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	11.800.000	11.800.000	100,00	100,00
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tahun	1	126.371.000	125.561.800	99,36	100,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	1	95.280.000	92.398.000	96,98	100,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tahun	1	19.511.200	19.511.000	100,00	100,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	23.931.000	23.931.000	100,00	100,00
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1	6.734.600	6.720.600	99,79	100,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tahun	1	24.000.000	19.245.500	80,19	100,00
5.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tahun	1	81.100.560	80.517.300	99,28	100,00
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	89.059.240	87.966.524	98,77	100,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satuan	36	263.570.000	242.020.311	91,82	100,00
5.2.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Unit	5	14.000.000	13.612.200	97,23	100,00
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tahun	1	10.300.000	10.217.138	99,20	100,00
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	23	228.270.000	207.195.973	90,77	100,00
5.2.02.30	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	7	11.000.000	10.995.000	99,95	100,00
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	108	9.643.200	5.850.000	60,66	100,00
5.2.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Orang	97	4.000.000	1.000.000	25,00	100,00
5.2.05.20	Peningkatan SDM Aparatur	Orang	11	5.643.200	4.850.000	85,94	100,00
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6	161.586.000	159.170.800	98,51	100,00
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	31.644.900	30.644.400	96,84	100,00

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
5.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	26.685.100	25.846.300	96,86	100,00
5.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen	4	103.256.000	102.680.100	99,44	100,00
5.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	20.954.000	20.951.800	99,99	100,00
5.2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Dokumen	1	20.954.000	20.951.800	99,99	100,00
5.2.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Satuan	53	378.300.000	375.399.000	99,23	100,00
5.2.15.07	Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan	Orang	50	30.000.000	29.724.500	99,08	100,00
5.2.15.09	Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Dokumen	1	146.500.000	144.222.900	98,45	100,00
5.2.15.10	Pengawasan Usaha Pertambangan	Dokumen	1	200.000.000	199.651.600	99,83	100,00
5.2.15.11	Peningkatan Kapasitas Penambang	Kelompok	1	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
5.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Satuan	491	1.364.160.000	1.217.908.659	89,28	100,00
5.2.17.01	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1	90.000.000	88.876.750	98,75	100,00
5.2.17.02	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	RTS Titik PJU-TS	4809	1.224.160.000	1.079.034.909	88,14	100,00
5.2.17.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1	50.000.000	49.997.000	99,99	100,00
5.2.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Satuan	5	1.108.765.000	875.945.741	79,00	100,00
5.2.18.01	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Dokumen	1	50.000.000	46.046.641	92,09	100,00
5.2.18.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Air Tanah	Unit	3	983.765.000	756.938.700	76,94	100,00
5.2.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah	Dokumen	1	75.000.000	72.960.400	97,28	100,00
5.2.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	5	301.741.800	288.238.659	95,52	100,00
5.2.19.01	Sinkronisasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	100.000.000	99.148.152	99,15	100,00
5.2.19.02	Pendataan Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	50.922.800	40.074.600	77,43	100,00
5.2.19.03	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	3	150.819.000	149.015.906	98,80	100,00
5.2.22	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Satuan	601	363.350.000	361.074.393	99,37	100,00
5.2.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Dokumen	1	50.000.000	49.984.400	99,97	100,00
5.2.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	Orang	600	313.350.000	311.089.993	99,28	100,00
5.2.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Satuan	542	8.446.500.000	7.496.933.211	88,76	100,00
5.2.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dokumen	1	35.500.000	25.480.000	71,77	100,00
5.2.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Unit	391	8.329.000.000	7.389.670.056	88,72	100,00
5.2.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Orang	150	82.000.000	81.783.155	99,74	100,00
	Balai ESDM Wilayah Sumbawa						

Kode	Program/Kegiatan	Satuan	Vol	Pagu DPPA	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
5.2	BELANJA LANGSUNG			341.936.700	332.495.040	97,24	100,00
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10	174.858.700	166.583.743	95,27	100,00
5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	500	680.000	288.000	42,35	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	25.516.000	19.630.732	76,93	100,00
5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tahun	1	11.880.000	11.880.000	100,00	100,00
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	1	70.140.000	68.693.000	97,94	100,00
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tahun	1	8.813.400	8.809.600	99,96	100,00
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	2.497.000	2.435.000	97,52	100,00
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1	2.332.300	2.332.300	100,00	100,00
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tahun	1	2.000.000	1.780.000	89,00	100,00
5.2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahun	1	50.000.000	49.735.111	99,47	100,00
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tahun	1	15.000.000	14.271.762	95,15	100,00
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Tahun	1	15.000.000	14.271.762	95,15	100,00
5.2.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	IUP	15	50.000.000	49.969.035	99,94	100,00
5.2.15.10	Pengawasan Usaha Pertambangan	IUP	15	50.000.000	49.969.035	99,94	100,00
5.2.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1	30.500.000	30.305.500	99,36	100,00
5.2.17.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Dokumen	1	30.500.000	30.305.500	99,36	100,00
5.2.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Dokumen	1	40.000.000	39.970.000	99,93	100,00
5.2.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah	Dokumen	1	40.000.000	39.970.000	99,93	100,00
5.2.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Dokumen	1	31.578.000	31.395.211	99,42	100,00
5.2.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dokumen	1	31.578.000	31.395.211	99,42	100,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN						90,13	

Disamping 3 indikator kinerja utama di atas, beberapa indikator kinerja yang tertuang dalam target Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2018, diperoleh nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan sebesar 91,60%;
2. Pencapaian Kinerja Program sebesar 90,33%;
3. Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 90,13%.
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Pendukung sebesar 112,56%.

Berdasarkan capaian keempat kinerja tersebut diatas diperoleh rata-rata capaian sebesar 96,16%.

Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Permasalahan tersebut timbul terkait dengan adanya hambatan regulasi dan pendanaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan diantaranya adalah permasalahan sub urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara dan sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan.

Permasalahan bidang pertambangan mineral dan batubara adalah masih banyaknya kegiatan penambangan tidak memiliki izin yang dilakukan oleh masyarakat dan kondisi ini menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin termasuk dalam kategori tindak pidana yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pemerintahan bidang ESDM sub urusan Mineral dan Batubara hanya diberi kewenangan terhadap penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan kewenangan dalam rangka pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pada sisi lain, dengan dicabutnya kewenangan urusan pemerintahan bidang ESDM di Kabupaten/Kota berakibat pada makin meningkatnya kegiatan penambangan tanpa izin, dimana sebelumnya permasalahan ini ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai satuan kerja terdepan di daerah. Penerapan perubahan kewenangan saat ini masih dalam status masa transisi yang memerlukan beberapa penyesuaian oleh Kementerian ESDM sebagai lembaga teknis yang menangani urusan pertambangan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah 2018 telah menetapkan program prioritas diantaranya adalah pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan untuk tahun 2018 yang dilaksanakan melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Energi Skala Kecil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 8.284.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.346.542.600,- (88,68%). Dana Alokasi Khusus (DAK) Energi Skala Kecil tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan sebanyak 391 unit yang terdiri dari pembangunan PLTS Komunal 1 unit, Rehabilitasi PLTS Komunal 1 unit dan pembangunan digester biogas rumah tangga sebanyak 389 unit yang keseluruhannya telah terbangun (capaian fisik 100%). Pengembangan pemanfaatan EBT dipilih sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan energi pada daerah-daerah yang memiliki akses yang sulit seperti daerah kepulauan dan daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur EBT untuk saat ini masih sangat mahal dibandingkan dengan infrastruktur energi dan listrik yang menggunakan energi

konvensional (fosil), sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan EBT. Selain pembangunannya yang mahal fasilitas EBT tersebut tidak memerlukan biaya bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Melalui program prioritas tersebut telah banyak dibangun infrastruktur EBT di seluruh pelosok tanah air termasuk di Provinsi NTB yang didanai melalui APBN. Banyak diantara fasilitas EBT yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.

Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga visi Dinas ESDM Provinsi untuk Mewujudkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat tercapai yang tidak hanya menjadi slogan belaka.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang energi dan sumber daya mineral. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB.

Dari hasil evaluasi dan analisa LKjIP Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2018, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2018 dapat dicapai dan terlampaui. Indikator Kinerja Utama dengan capaian: Realisasi Rasio Elektrifikasi 93,83% (Capaian 125,11%), dan indikator kinerja pendukung berupa Cakupan Air Bersih Realisasinya 255 KK (Capaian 100%). Kedua capaian indikator kinerja utama dan pendukung tadi bila dirata-ratakan, maka diperoleh nilai 112,56%. Dari indikator sasaran yang ada tahun 2018, yang terdiri dari: 11 indikator program (90,33%), 39 indikator kegiatan (91,60%) dan juga indikator capaian keuangan (90,13%) yang tertuang dalam Renja (DPA/DPPA tahun 2018), sehingga diperoleh rata-rata sebesar 90,69 %. Bila seluruh capaian indikator digabungkan, mulai dari capaian Indikator Kinerja Utama (RPJMD), capaian indikator kinerja sasaran (Renstra SKPD), capaian indikator kinerja Program, kegiatan dan keuangan maka diperoleh rata-rata nilai sebesar 99,29%.

Dinas ESDM Provinsi NTB sebagai salah satu instansi teknis bidang energi dan sumber daya mineral telah berusaha dengan berbagai upaya sesuai dengan kemampuannya untuk mewujudkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Namun demikian belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, setidaknya upaya tersebut tidak keluar dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pembinaan dan pengawasan yang internal, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat serta para pihak.

Kiranya LKjIP Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis dalam menyongsong periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan pada masa-masa mendatang.

LAMPIRAN LKjIP TAHUN 2018

Lampiran - 1

MATRIKS MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. NTB TAHUN 2013 - 2018

VISI: MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NTB

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
1.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan listrik	1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengusahaan Ketenagalistrikan	1 Tersedianya dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional 2 Tersedianya rekomendasi teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan/atau IUPTL Sementara 3 Tersedianya rekomendasi teknis izin operasi (IO) yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi 4 Tersedianya rekomendasi teknis izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki penanam modal dalam negeri; 5 Tersedianya tarif tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUPTL 6 Tersedianya peraturan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang IUPTL	1 Koordinasi / konsultasi pembentukan tim penyusunan 2 Penyuluhan perizinan bidang ketenagalistrikan; 3 Fasilitasi penyedia tenaga listrik untuk penerbitan IUPTL dan Izin Operasi (IO); 4 Koordinasi penentuan tarif tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik.	1 Kerjasama dengan lembaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat Memasyarakatkan hemat energi	17 Program Pembinaan, dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17]	17.01 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17.01] 17.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17.03]
		1.2 Meningkatkan produktifitas dan kapasitas tenaga listrik	1 Tersedianya data cakupan listrik 2 Tersedianya data Inventarisasi potensi sumber tenaga listrik 3 Tersedianya data kebutuhan listrik 4 Terbangunnya infrastruktur ketenagalistrikan	1 Koordinasi / konsultasi dengan pihak terkait; Fasilitasi pema-sangan listrik untuk rumah tangga kurang mampu yang belum berlistrik 2	1 Kerjasama dengan lembaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat Mengendalikan tingkat produksi dan peman faatannya 4	17 Program Pembinaan, dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17]	17.02 Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17.02]
		1.3 Meningkatkan efektifitas pengawasan usaha bidang ketegalistrikan	1 Tersedianya data inventarisasi usaha penyediaan tenaga listrik 2 Terawasinya pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik IUPTL 3 Terawasinya pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan (IO) 4 Terawasinya pelaksanaan izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan	1 Koordinasi penyedia tenaga listrik dan penyedia jasa penunjang tenaga listrik; Fasilitasi jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan. 2	1 Kerjasama dengan lembaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat 3 Memberikan pemahaman penyedia usaha tenaga listrik terhadap peraturan	17 Program Pembinaan, dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17]	17.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17.03]

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			5 Tersedianya inspektur ketenagalistrikan dan jabatan fungsional bidang ketenagalistrikan		perundang-undangan terkait ketenagalistrikan		
2.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air tanah dan informasi geologi	2.1 Meningkatnya kualitas data dan informasi peta potensi geologi dan air tanah	1 Tersedianya data dan informasi serta promosi potensi geologi dan air tanah yang berkualitas;	1 Sosialisasi mitigasi bencana dan menciptakan masyarakat tanggap bencana geologi;	1 Kerjasama dengan lembaga terkait	18 Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah [2.03.18]	18.001 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah [2.03.18.01]
			2 Tersusunnya regulasi di bidang geologi dan air tanah;	2 Literasi mengenai mitigasi bencana geologi	2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota		
			3 Tersedianya peta hidrogeologi dan potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah;	3 Pemetaan potensi air tanah dan mitigasi potensi bencana geologi	3 Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi non pemerintah		18.002 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah [2.03.18.02]
			4 Tersedianya hasil inventarisasi, pemetaan dan neraca sumber daya mineral;				
			5 Tersedianya hasil inventarisasi, pemetaan dan mitigasi kebencanaan geologi.				
		2.2 Meningkatnya efektifitas pemanfaatan air tanah	1 Tersedianya rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin di bidang air tanah;	1 Fasilitasi sarana dan prasarana pemanfaatan sumber air tanah;	1 Kerjasama dengan lembaga terkait	18 Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah [2.03.18]	18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah [2.03.18.01]
			2 Tersedianya hasil perhitungan dan penetapan harga dasar air tanah yang memadai;	2 Inventarisasi Potensi air tanah	2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota		
			3 Terbangunnya sumur bor di daerah rawan kekeringan;	3 Konstruksi sarana dan prasarana sumur bor air tanah	3 Mendorong partisipasi masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah		18.02 Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah [2.03.18.02]
			4 Terbina, terawasi dan terkendalinya pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan.				18.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah
		2.3 Meningkatnya efektifitas Pengelolaan air tanah	1 Tersedianya zona pemanfaatan dan konservasi air tanah secara terpadu;	1 Konservasi pemanfaatan sumber air tanah secara bijak;	1 Kerjasama dengan lembaga terkait	18 Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah [2.03.18]	18.01 Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah [2.03.18.01]
			2 Tersedianya data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian pencemaran air tanah;	2 Inventarisasi keaneka ragaman potensi sumber daya geologi berkelas dunia	2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota		
			3 Tersedianya jaringan dan pembangunan sumur pantau air tanah yang merata;				
			4 Terbangunnya sumur gali dan sumur pasak untuk air bersih yang merata;				

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			5 Tersertifikasinya juru bor air tanah dan sertifikasi instalasi bor air tanah yang terampil.				
3.	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan mineral dan batubara	3.1 Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara	1 Terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar 2 Terlaksananya bimbingan teknis terhadap pemegang izin usaha pertambangan; 3 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan skala kecil; 4 Tersedianya izin usaha pertambangan; 5 Tersedianya izin usaha jasa pertambangan;	1 Koordinasi penanganan PETI secara terpadu; 2 Revitalisasi kelembagaan kelompok penambang tradisional	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah	15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan [2.03.15]	15.07 Penyuluhan kegiatan bidang pertambangan [2.03.15.07] 15.09 Pembinaan perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan [2.03.15.09] 15.10 Pengawasan Usaha Pertambangan [2.03.15.10] 15.011 Peningkatan Kapasitas Penambang [2.03.15.011]
		3.2 Meningkatkan efektifitas Pengendalian usaha Pertambangan	1 Terlaksananya pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan; 2 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha jasa pertambangan; 3 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. 4 Tersedianya bahan usulan Inspektur Tambang dan administrasi K3; 5 Terkoordinasinya penertiban PETI dan penyelesaian masalah tumpang tindih lahan untuk kegiatan pertambangan	1 Penerapan Good Mining Practise;	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat		15.09 Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan [2.03.15.09]
		3.3 Meningkatkan kualitas Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara	1 Tersedianya data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya mineral dan pengelolaan lingkungan pertambangan; 2 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan reklamasi lahan bekas tambang dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan; 3 Terawasanya produksi pertambangan; 4 Tersedianya Dokumen kajian harga mineral bukan logam dan batuan.	1 Aktifitas pertambangan secara berkelanjutan; 2 Mendorong upaya Peningkatan nilai tambah mineral	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah		15.10 Pengawasan Usaha Pertambangan [2.03.15.10]

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
4.	Meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi	4.1 Meningkatkan produktifitas dan kapasitas energi baru terbarukan	1 Tersedianya rencana pengembangan energi baru terbarukan 2 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik dan Biogas bagi masyarakat 3 Tersedianya kebijakan pengelolaan bidang energi lintas kabupaten/kota 4 Tersedianya hasil survey dan data sumber-sumber energi baru terbarukan 5 Tersedianya layanan jasa teknis dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru	1 Optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber energi lokal guna mewujudkan peningkatan cakupan Listrik; Fasilitasi pema-sangan listrik perdesaan dan biogas untuk rumah tangga berbasis energi baru terbarukan 2	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat 4 Mengendalikan tingkat produksi dan pemanfaatannya	24 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi [2.03.24]	24.02 Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan [2.03.24.002] 24.01 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan [2.03.24.01]
		4.2 Meningkatkan efektifitas pengusahaan energi baru terbarukan	1 Tersedianya rekomendasi teknis usaha bidang energi baru terbarukan 2 Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 3 Tersedianya acuan pengembangan energi daerahTerkendalinya arah pengelolaan energi daerah 4 Tersedianya hasil inventarisasi usaha bidang energi baru terbarukan 5 Tersdiannya data dan informasi potensi energi baru terbarukan di daerah 6 Tersediannya rencana pengembangan dan pemanfaatan bidang energi baru terbarukan 7 Meningkatnya pemahaman penyedia jasa terhadap perizinan di bidang energi	1 Fasilitasi dalam rangka pemberian izin usaha bidang energi; Koordinasi / konsultasi dan pembentukan tim penyusunan dokumen rancangan Perda RUED 2	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat 4 Mengendalikan tingkat produksi da pemanfaatannya.	24 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi [2.03.24]	24.01 Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan [2.03.24.01]
		4.3 Meningkatkan efektifitas pemanfaatan Energi	1 Terbina dan terawasinya usaha bidang energi baru dan terbarukan 2 Tersedianya kebijakan pengelolaan bidang energi	1 Diversifikasi pemanfaatan energi; 2	1 Kerjasama dengan lembaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota	24 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi [2.03.24]	24.01 Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan [2.03.24.01]

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			3 Tersedianya hasil survey dan data sumber-sumber energi baru terbarukan 4 Tersedianya layanan jasa teknis dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru 5 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konservasi energi	Sosialisasi konservasi energi;	3 Mendorong partisipasi masyarakat 4 pengembangan desa mandiri energi 5 Pemasyarakatan hemat energi		24.03 Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi [2.03.24.03]
5.	Mendukung peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha bidang sumber daya mineral dan energi	5.1 Meningkatnya efektifitas tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral 5.2 Meningkatnya efektifitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara 5.3 Meningkatnya efektifitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan	1 Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan, program dan pelaporan UPT 2 Tersedianya rencana program dan kegiatan UPT 3 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 4 Terlaksananya penatausahaan kepegawaian 5 Tersedianya aparatur yang terampil 1 Tersedianya hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis perizinan bidang air tanah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai ketentuan 2 Tersedianya laporan hasil pemantauan dan pengendalian perusahaan air tanah dan pertambangan mineral dan batubara 1 Tersedianya hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis perizinan bidang energi dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan 2 Tersedianya laporan hasil pemantauan dan pengendalian perusahaan energi dan ketenagalistrikan	1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi (KISS); 2 Penerapan sistem Anggaran berbasis Kinerja (ABK) 1 Fasilitasi dalam rangka rekomendasi teknis penerbitan izin bidang air tanah dan pertambangan mineral dan batubara 1 Fasilitasi dalam rangka pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin energi dan ketenagalistrikan	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat 1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat 1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Mendorong partisipasi masyarakat	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran [2.03.01] 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan [2.03.15] 18 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17]	01.02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik [2.03.01.002] 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan [2.03.01.007] 01.17 Penyediaan makanan dan minuman [2.03.01.017] 01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota [2.03.01.020] 15.010 Pengawasan Usaha Pertambangan [2.03.15.10] 18.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah [2.03.18.03] 17.03 Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan [2.03.17.03]
6.	Mendorong upaya peningkatan sinergitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	6.1 Meningkatnya kualitas Program dan laporan;	1 Tersedianya bahan untuk perumusan kebijakan, program dan pelaporan; 2 Tersedianya rencana program dan kegiatan program	1 Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan 2 Simplifikasi (KISS); Penerapan sistem Anggaran berbasis Kinerja (ABK)	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3	19 Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral [2.03.19] 19.03	19.01 Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral [2.03.19.001] 19.03 Pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral [2.03.19.003]

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			3 Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 4 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan		Mendorong partisipasi masyarakat	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan [2.03.06]	6.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD [2.03.06.05]
		6.2 Meningkatnya kualitas laporan keuangan	1 Terlaksananya penataan administrasi keuangan; 2 Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset BMD; 3 Tersedianya laporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut	1 Aktualisasi prinsip-prinsip Laporan Keuangan yang Akuntabel berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota 3 Penetapan SOP dan penerapan SPM	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran [2.03.01] 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan [2.03.06] 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur [2.03.05]	1.002 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik [2.03.01.002] 1.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan [2.03.01.007] 1.017 Penyediaan makanan dan minuman [2.03.01.017] 1.018 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah [2.03.01.018] 1.020 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota [2.03.01.020] 6.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun [2.03.06.004] 5.004 Pembinaan mental dan fisik aparatur [2.03.05.004]
		6.3 Meningkatnya kualitas laporan kepegawaian	1 Terlaksananya petatausahaan kepegawaian; 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian; 3 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran 4 Tersedianya laporan Kepegawaian	1 Peningkatan disiplin aparatur; 2 Reformasi birokrasi; 3 Pelayanan Prima	1 Kerjasama dengan embaga terkait 2 Kerjasama dengan pusat, kabupaten/ kota	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran [2.03.01]	1.001 Penyediaan jasa surat menyurat [2.03.01.001] 1.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor[2.03.01.003] 1.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor [2.03.01.008] 1.010 Penyediaan alat tulis kantor [2.03.01.010] 1.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan [2.03.01.011] 1.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor [2.03.01.012] 1.014 Penyediaan peralatan rumah tangga [2.03.01.014]

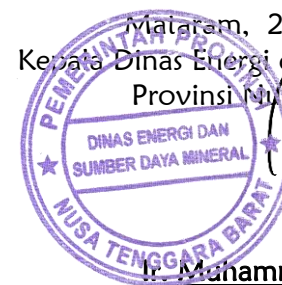
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
							1.019 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran [2.03.01.019]
							2.010 Pengadaan meubelair [2.03.02.010]
							2.011 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik [2.03.02.011]
							2.012 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi [2.03.02.012]
							2.013 Pengadaan AC/alat pendingin [2.03.02.013]
							2.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor [2.03.02.022]
							2.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional [2.03.02.024]
			5 Tersedianya aparatur yang terampil			5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur [2.03.05]	2.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor [2.03.02.030]
							5.020 Peningkatan SDM aparatur [2.03.05.020]

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik	Rasio Elektrifikasi	75,00%
Terwujudnya dukungan peningkatan cakupan air bersih	Jumlah KK/jiwa penduduk yang menikmati air bersih	255 KK

Mataram, 28 Desember 2017
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. Muhammed Husni, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620825 199103 1 008

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD / Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Cakupan Listrik	a. Tercapainya Rasio Elektrifikasi (cakupan listrik)	75 %
		b. Terbinanya dan terawasinya kegiatan usaha bidang ketenagalistrikan	1 Dokumen
		c. Tersedianya dokumen perusahaan ketenagalistrikan	1 Dokumen
		d. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk masyarakat kurang mampu	450 RTS
2.	Tersedianya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan	a. Tersedianya dokumen evaluasi RAD GRK	1 Dokumen
		b. Tersedianya infrastruktur energi baru terbarukan	391 Unit
		c. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	150 Orang
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelompok Penambang	a. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan	50 Orang
		b. Terlaksananya pembinaan perizinan perusahaan pertambangan	1 Dokumen
		c. Terawasinya kegiatan usaha pertambangan	1 Dokumen
		d. Terbinanya kelompok penambang batuan	2 Kelompok
4.		a. Tersusunnya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	1 Dokumen

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
	Terwujudnya Peningkatan Cakupan Air Bersih	b. Terbangunnya sumur bor produksi	3 Unit
		c. Tersedianya dokumen pengusahaan air tanah	1 Dokumen
5.	Terwujudnya Penurunan Resiko Kerugian/Korban Akibat Bencana Alam Geologi dan Terjaganya Keanekaragaman Geologi	a. Tersedianya informasi kejadian Bencana Alam Geologi	1 Dokumen
		b. Tersedianya data dan tersebar informasi geopark dan potensi kawasan lindung geologi	300 Orang 4 Unit
6.	Tersedianya Sarana Pendukung dan Jasa Penunjang Operasional 1. Administrasi dan Ketatalaksanaan Rumah Tangga Dinas ESDM	a. Terlaksananya surat menyurat dinas	1200 Lembar
		b. Tersedianya Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah, Internet dan Website	12 Bulan
		c. Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		d. Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan
		e. Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor	12 Bulan
		f. Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
		g. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		h. Tersedianya komponen listrik/penerangan	12 Bulan
		i. Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan
		j. Terlaksananya rapat/koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	12 Bulan
		k. Terlaksananya rapat/koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan
7.	Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan Penunjang Dalam Rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	a. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik	1 Paket
		b. Terpeliharanya kendaraan dinas	22 Unit
		c. Terpeliharanya peralatan kantor	7 Unit

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
8.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Terbinanya mental dan fisik aparatur	92 Orang
		b. Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur	3 Orang
9.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	a. Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen
		b. Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
		c. Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan tahunan perangkat daerah	3 Dokumen
10.	Tertibnya Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Aset BMD	1 Dokumen
11.	Terwujudnya perencanaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang tepat sasaran	a. Tersedianya dokumen usulan program/kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen
		b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	3 Dokumen

Mataram, 28 Desember 2017
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. Muhammad Husni, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Cakupan Listrik	a. Tercapainya Rasio Elektrifikasi (cakupan listrik)	75 %
		b. Terbinanya dan terawasinya kegiatan usaha bidang ketenagalistrikan	1 Dokumen
		c. Tersedianya dokumen perusahaan ketenagalistrikan	1 Dokumen
		d. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk masyarakat kurang mampu	480 RTS
2.	Tersedianya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan	a. Tersedianya dokumen evaluasi RAD GRK	1 Dokumen
		b. Tersedianya infrastruktur energi baru terbarukan	391 Unit
		c. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	150 Orang
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelompok Penambang	a. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kegiatan bidang pertambangan	50 Orang
		b. Terlaksananya pembinaan perizinan perusahaan pertambangan	1 Dokumen
		c. Terawasinya kegiatan usaha pertambangan	1 Dokumen
		d. Terbinanya kelompok penambang batuan	2 Kelompok
4.	Terwujudnya Peningkatan Cakupan Air Bersih	a. Tersusunnya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	1 Dokumen
		b. Terbangunnya sumur bor produksi	3 Unit
		c. Tersedianya dokumen perusahaan air tanah	1 Dokumen
5.	Terwujudnya Penurunan Resiko Kerugian/Korban Akibat Bencana Alam Geologi dan Terjaganya Keanekaragaman Geologi	a. Tersedianya informasi kejadian Bencana Alam Geologi	1 Dokumen
		b. Tersedianya data dan tersebar informasi geopark dan potensi kawasan lindung geologi	300 Orang 4 Unit
6.	Tersedianya Sarana Pendukung dan Jasa Penunjang Operasional 1. Administrasi dan Ketatalaksanaan Rumah Tangga Dinas ESDM	a. Terlaksananya surat menyurat dinas	1200 Lembar
		b. Tersedianya Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah, Internet dan Website	12 Bulan
		c. Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		d. Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan
		e. Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor	12 Bulan
		f. Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan
		g. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		h. Tersedianya komponen listrik/penerangan	12 Bulan
		i. Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan
		j. Terlaksananya rapat/koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	12 Bulan
		k. Terlaksananya rapat/koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan
		a. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik	1 Paket

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
	Tersedianya dan Terpeliharanya Peralatan Penunjang Dalam Rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	b. Terpeliharanya kendaraan dinas	22 Unit
		c. Terpeliharanya peralatan kantor	7 Unit
8.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Terbinanya mental dan fisik aparatur	92 Orang
		b. Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur	3 Orang
9.	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	a. Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen
		b. Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
		c. Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan tahunan perangkat daerah	3 Dokumen
10.	Tertibnya Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Aset BMD	1 Dokumen
11.	Terwujudnya perencanaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang tepat sasaran	a. Tersedianya dokumen usulan program/kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen
		b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	3 Dokumen

Lanjutan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp. 1.364.160.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 1 dengan indikator huruf a, b, c dan d
2.	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Rp. 8.446.500.000	Sumber dana APBD dan DAK, mendukung sasaran strategis nomor 2 dengan indikator kinerja huruf a b dan c
3.	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp. 378.300.000	Sumber dana APBD , mendukung sasaran strategis nomor 3 dengan indikator kinerja huruf a, b, c dan d
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Rp. 1.108.765.000	Sumber dana APBD , mendukung sasaran strategis nomor 4 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
5.	Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Rp. 363.350.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 5 dengan indikator kinerja huruf a dan b
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 624.247.600	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 6 dengan indikator kinerja huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 263.570.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 7 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 9.643.200	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 8 dengan indikator kinerja huruf a dan b
9.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 161.586.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 9 dengan indikator kinerja huruf a, b dan c
10.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 20.954.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 10

Program		Anggaran	Keterangan
11.	Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 301.741.800	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 11 dengan indikator kinerja huruf a dan b

Gubernur NTB



Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Mataram, 2018
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 5

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Program/Kegiatan		Anggaran			Fisik
			Satuan	Volume	Volume	%			Pagu	Realisasi	%	%
1	Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik	Rasio elektrifikasi *)	%	75,00	93,83	125,11	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		1.364.160.000	1,217,908,659	89,28	100,00
	Terstrukturnya rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi bidang ketenagalistrikan	dokumen	1	1	100,00	a	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	90.000.000	88.876.750	98,75	100,00
		Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	RTS	480	480	100,00	b	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Kelistrikan	1.224.160.000	1.079.034.909	88,14	100,00
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya	unit	9	9	100,00						
		Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	dokumen	1	1	100,00	c	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	50.000.000	49.997.000	99,99	100,00
2	Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan berbasis energi baru terbarukan						Program pengembangan dan pemanfaatan energi		8.446.500.000	7.496.933.211	88,76	100,00
		Terbangunnya PLTS Terpusat	unit	1	1	100,00		Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	8.329.000.000	7.389.670.056	88,72	100,00
		Terehabilitasinya PLTS Terpusat	unit	1	1	100,00						
		Terbangunannya Biogas skala rumah tangga	unit	389	389	100,00						

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Program/Kegiatan	Anggaran			Fisik
			Satuan	Volume	Volume	%		Pagu	Realisasi	%	%
3	Mendukung peningkatan cakupan air bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang mamadai **)	KK	255	255	100,00	Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah	1.108.765.000	875.945.741	79,00	100,00
	Tersedianya sarana prasarana pemanfaatan air bersih	Jumlah sumur bor produksi air tanah yang dibangun	unit	3	3	100,00	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	983.765.000	756.938.700	76,94	100,00
4	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kelompok tambang	Tercapainya pengendalian pengelolaan perusahaan pertambangan yang sesuai ketentuan perundang-undangan					Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	378.300.000	375.399.000	99,23	100,00
		Tersuluhnya peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara	orang	50	50	100,00	Penyuluhan kegiatan bidang pertambangan	30.000.000	29.724.500	99,08	100,00
		Dokumen Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Perusahaan Pertambangan	dokumen	1	1	100,00	Pembinaan perizinan dan pengendalian perusahaan pertambangan	146.500.000	144.222.900	98,45	100,00
		Dokumen pengawasan kegiatan usaha pertambangan	dokumen	1	1	100,00	Pengawasan Usaha Pertambangan	200.000.000	199.651.600	99,83	100,00
		Terbinanya kelompok tambang batuan	Kelompok	1	1	100,00	Peningkatan Kapasitas penambang	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
5	Tertibnya pengelolaan ESDM secara teknis dan administratif	Sinergisnya perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan					Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral	161.586.000	159.170.800	98,51	100,00
		Tersedianya dokumen usulan Program/Kegiatan SKPD	dokumen	1	1	100,00	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	103.256.000	102.680.100	99,44	100,00
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	31.644.900	30.644.400	96,84	100,00
		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	100,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	26.685.100	25.846.300	96,86	100,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Program/Kegiatan	Anggaran			Fisik
			Satuan	Volume	Volume	%		Pagu	Realisasi	%	%
6	Teraktualisasainya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif	Tersedianya dokumen sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	dokumen	1	1	100,00	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	100.000.000	99.148.153	99,15	100,00
		Tersedianya data dan informasi sektor ESDM	dokumen	1	1	100,00	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	50.922.800	40.074.600	77,43	100,00
		Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	dokumen	1	1	100,00	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	150.819.000	149.015.906	98,80	100,00
7	Berkurangnya resiko kerugian/ korban bencana alam geologi, terkendalinya kegiatan eksplorasi panasbumi dan terjaganya keragaman geologi	Tercipatnya masyarakat NTB yang tanggap bencana geologi					Program pencegahan kerusakan lingkungan	363.350.000	361.074.393	99,37	99,93
		Tersedianya Dokumen informasi kejadian bencana alam geologi	Dokumen	1	1	100,00	Mitigasi rawan bencana alam geologi	50.000.000	49.984.400	99,97	100,00
		Tersosialisasinya Pemahaman informasi geopark kepada masyarakat (pelajar)	Orang	600	600	100,00	Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	313.350.000	311.089.993	99,28	100,00
		Tersedianya Papan Informasi Geopark	Buah	3	3	100,00	Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	313.350.000	311.089.993	99,28	100,00

Mataram, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



W. Muhammad Husni, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran - 6

LAPORAN PENDUKUNG LKJP/LAKIP TAHUN 2018

- a. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018
SKPD/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Program	Target/ Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
		2017	2018	2017	2018	Thd 2017	Thd target 2018		2017	2018	2017	2018	Thd 2017	Thd target 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 5/3 x 100%	(8) 6/4 x 100%	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) 12/10 x 100%	(15) 13/11 x 100%	(16)
Terwujudnya pengusahaan pertambangan yang baik dan benar	Tersedianya arahan kebijakan pengusahaan pertambangan yang berpedoman pada prinsip Good Mining Practises							Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	871.520.400	378.300.000	847.453.247	375.399.000	97,24	99,23	100,00
	Jumlah aparatur Pemkab/ Pemkot peserta penyuluhan pengendalian usaha pertambangan minerba	285	50	285	50	100,00	100,00								100,00
	Jumlah orang yang mengikuti pertemuan teknis K3 dan Lingkungan	20	-	20	-	100,00	-								-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pertemuan Teknis Usaha Jasa Pertambangan	30	-	30	-	100,00	-								-
	Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	-	1	-	100,00	-								-
	Jumlah pemegang IUP/IPR yang diawasi	40	-	40	-	100,00	-								-
	Jumlah kelompok tambang batuan yang dibina	6	1	6	1	100,00	100,00								100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Program	Target/ Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
		2017	2018	2017	2018	Thd 2017	Thd target 2018		2017	2018	2017	2018	Thd 2017	Thd target 2018	
Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik	Rasio elektrifikasi *)	72,67	75,00	85,10	93,83	117,10	125,11	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	5.939.301.800	1.364.160.000	5.555.917.554	1.217.908.659	93,54	89,28	100,00
Terstrukturnya rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	-	1	-	1	-	100,00								100,00
	Jumlah sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	1710	480	1710	480	100,00	100,00								100,00
	Jumlah Sarana Fasilitas Umum Tenaga Surya	13	9	13	9	100,00	100,00								100,00
	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	-	1	-	1	-	100,00								100,00
Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai								Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	4.267.508.850	8.446.500.000	3.919.906.973	7.496.933.211	91,85	88,76	100,00
	PLTS Komunal yang dibangun	-	1	-	1	-	100,00								100,00
	PLTS Komunal yang direhabilitasi	-	1	-	1	-	100,00								100,00
	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan tentang perizinan bidang energi	100	75	100	75	100,00	100,00								100,00
	Biogas skala rumah tangga yang terbangun (unit)	160	389	160	389	100,00	100,00								100,00
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang kebijakan konservasi energi	200	75	200	75	100,00	100,00								100,00
Meningkatnya kecukupan air baku bagi masyarakat	Jumlah Sarana pemanfaatan air bawah tanah dibangun	9	3	9	3	100,00	100,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	2.635.420.200	1.108.765.000	2.461.544.760	875.945.741	93,40	79,00	100,00
	Sumur Bor Produksi	9	3	9	3	100,00	100,00								100,00
	Jumlah KK terlayani	765	255	765	255	100,00	100,00								100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		% Capaian		Program	Target/ Anggaran		Realisasi Anggaran		% Capaian		% Fisik
		2017	2018	2017	2018	Thd 2017	Thd target 2018		2017	2018	2017	2018	Thd 2017	Thd target 2018	
Terwujudnya Sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi								Pencegahan Kerusakan Lingkungan	1.416.983.400	363.350.000	1.296.116.450	361.074.393	91,47	99,37	100,00
	Tersosialisasinya Pemahaman informasi geopark kepada masyarakat	600	600	600	600	100,00	100,00								100,00
	Papan Informasi Geopark Rinjani dan Geopark Tambora	6	3	6	3	100,00	100,00								100,00
	Dokumen informasi kejadian bencana alam geologi	-	1	-	1	-	100,00								100,00
Tertibnya pengelolaan ESDM secara teknis dan administratif	Dokumen usulan Program/Kegiatan SKPD yang disusun	1	1	1	1	100,00	100,00	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	126.697.500	161.586.000	121.018.500	159.170.800	95,52	98,51	100,00
	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1	1	1	1	100,00	100,00								100,00
	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	1	1	1	100,00	100,00								100,00
Teraktualisasainya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif	Tersedianya dokumen sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	1	1	1	1	100,00	100,00	Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	436.140.400	301.741.800	403.290.034	288.238.659	92,47	95,52	100,00
	Tersedianya data dan informasi sektor energi dan sumber daya mineral	1	1	1	1	100,00	100,00								100,00
	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral	1	1	1	1	100,00	100,00								100,00

b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target RPJMD

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2018 di Provinsi NTB, ratio elektrifikasi merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 sesuai Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014, dan indikator lainnya merupakan dukungan peningkatan cakupan air bersih yang menjadi IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Target peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 75,00% pada Tahun 2018 yang direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, dukungan Proyek Listrik Mandiri PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta pembangkit listrik *swasta/Independent Power Producer* (IPP). Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi tersebut diantaranya:

- 1.) Pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan dengan pembiayaan APBD;
- 2.) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dengan pembiayaan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil;
- 3.) Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Provinsi NTB dengan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2018;
- 4.) Pengembangan ketenagalistrikan oleh badan hukum swasta atau disebut dengan *Independent Power Producer* (IPP)

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2018 sebesar 93,83%, telah melampaui target Rasio Elektrifikasi sebesar 75,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00% atau capaiannya sebesar 125,11%. Sampai akhir tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menikmati listrik sebanyak 5.227.588 jiwa (1.306.897 KK) atau 93,83% dari Jumlah Penduduk 5.571.508 jiwa (1.392.877 KK). Dengan kata lain masih ada sekitar 6,17% (343.920 jiwa atau 85.980 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

c. Permasalahan dan Upaya Pemecahan masalah dalam rangka Pencapaian Target RPJMD

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih ada sekitar 6,17% (343.920 jiwa atau 85.980 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik, terutama <i>Remote Area</i> yang sulit terjangkau PLN.	Sejak tahun 2012 telah dilaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat (listrik gratis) bagi masyarakat tidak mampu (miskin) melalui pembiayaan APBN dan APBD. Sampai dengan tahun 2018 telah dilakukan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 24.277 Rumah Tanga Sasaran (RTS) atau 1,74% dari jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTB. Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan

PERMASALAHAN	SOLUSI
	Energi Baru Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk alokasi dari dana APBN;
Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.	Sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi mulai mendapatkan alokasi DAK bidang Energi Skala Kecil. Dalam berbagai forum pertemuan telah disampaikan agar DAK tersebut juga dapat digunakan untuk revitalisasi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat. Mendorong Pemerintah Pusat menginventarisai aset infrastruktur energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mendorong langkah-langkah percepatan penyerahan infrastruktur energi baru terbarukan kepada daerah, agar daerah dapat mengalokasikan anggaran perbaikan.

d. Prestasi SKPD di tingkat Provinsi.

Untuk tahun 2018 tidak ada prestasi yang didapatkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.

Mataram, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. Muhammad Husni, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199103 1 008



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS ESDM PROVINSI NTB TAHUN 2018



Dinas Esdm Ntb



desdm@ntbprov.go.id



www.desdm.ntbprov.go.id